

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP POTENSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**



Diajukan Oleh:

Ari Singgar Cahyani

22919003

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP POTENSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh:

Ari Singgar Cahyani

22919003

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa salam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai peraturan yang berlaku”.

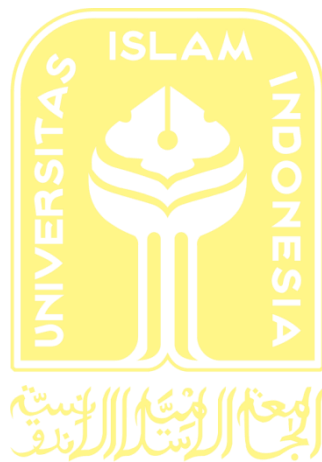
Yogyakarta, 13 Februari 2025



Handwritten signature of Ari Singgar Cahyani in black ink.

Ari Singgar Cahyani

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is placed below the title 'Dosen Pembimbing'.

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ARI SINGGAR CAHYANI

No. Mhs. : 22919003

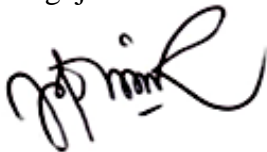
Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP POTENSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Ramman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis berjudul "**Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan**" sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh derajat Parcasarjana Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tak lupa penulis haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Penulisan tugas akhir ini tentunya masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Selain proses yang cukup menguras waktu dan pikiran, penyelesaian tesis ini tidak lepas dari segala bantuan, usaha, doa, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** yang memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, ketenteraman hati, petunjuk, hidayah, dan segala kebesaran, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. **Nabi Muhammad SAW** sebagai teladan di muka bumi yang telah membimbing umatnya terhindar dari gelapnya kebodohan menuju zaman yang terang benderang.
3. **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.

4. **Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA., CertIPSAS** selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dan selaku dosen pembimbing tesis yang telah membantu dan selalu sabar dalam membimbing penulis, serta selalu memberikan saran dan solusi hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terima kasih Bapak atas segala ilmu yang diberikan.
5. **Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.
6. **Bapak Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D., Cert D.A.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.
7. **Orang tua penulis, Ibu Kadiyuk dan Bapak Syamsul Bahri** yang setiap waktu mendoakan, memberikan kasih sayang, mendukung, dan melakukan segalanya hingga membawa penulis sampai pada titik ini. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT.
8. **Teman-teman Magister Akuntansi FBE UII** atas bantuan, pengalaman, dan pertemanan yang akan selalu terkenang.

Penulis berdoa semoga kebaikan pihak-pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT dan berharap semoga tesis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan, khususnya pembaca. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam karya ilmiah ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Ari Singgar Cahyani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Batasan Masalah.....	16
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1. Landasan Teori	17
2.1.1. Teori Keagenan	17
2.1.2. Teori Akuntabilitas	20
2.1.3. Teori Akuntansi Positif.....	22
2.1.4. Kecurangan Laporan Keuangan.....	24
2.1.5. Tata Kelola Perusahaan	26
2.1.6. Koneksi Politik.....	30
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32

2.3.	Pengembangan Hipotesis Penelitian	41
2.3.1.	Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	41
2.3.2.	Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	43
2.3.3.	Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	45
2.3.4.	Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	46
2.3.5.	Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	48
2.3.6.	Pengaruh koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	51
2.4.	Kerangka Konseptual	53
BAB III: METODE PENELITIAN		55
3.1.	Desain Penelitian.....	55
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian	56
3.3.	Jenis dan Metode Pengumpulan Data	57
3.3.1.	Jenis Data	57
3.3.2.	Metode Pengumpulan Data	57
3.4.	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	57
3.4.1.	Variabel Dependen	58
3.4.2.	Variabel Independen.....	60
3.4.3.	Variabel kontrol.....	65
3.5.	Teknik Analisis Data	66
3.5.1.	Statistik Deskriptif	66
3.5.2.	Pengujian <i>Hosmer and Lemshow's Goodness of Fit Test</i>	66
3.5.3.	Pengujian Akurasi Tingkat Prediksi	67
3.5.4.	Pengujian McFadden R^2	67
3.5.5.	Pengujian Kelayakan Keseluruhan Regresi (<i>Overall Model Fit</i>) ..	68

3.5.6. Analisis Regresi Logistik	68
3.5.7. Uji Hipotesis	69
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian	70
4.2. Statistik Deskriptif	71
4.3. Pengujian <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	75
4.4. Pengujian Akurasi Tingkat Prediksi	76
4.5. Pengujian McFadden's R^2	77
4.6. Pengujian Kelayakan Keseluruhan Regresi (<i>Overall Model Fit Test</i>)	78
4.7. Analisis Regresi Logistik	78
4.8. Uji Hipotesis	79
4.9. Diskusi dan Pembahasan.....	83
4.8.1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	83
4.8.2. Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	85
4.8.3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	87
4.8.4. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	89
4.8.5. Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	90
4.8.6. Pengaruh koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan	91
4.8.7. Variabel kontrol.....	94
BAB V: KESIMPULAN, BATASAN, KONTRIBUSI DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Batasan	101
5.3. Kontribusi dan Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Dependen (Model Beneish)	59
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel Independen.....	65
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel.....	70
Tabel 4.2 Hasil Deskripsi Statistik.....	71
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	76
Tabel 4.4 Hasil Uji Akurasi Tingkat Prediksi.....	76
Tabel 4.5 Hasil Uji McFadden's R^2	77
Tabel 4.6 Hasil Uji Kelayakan Keseluruhan Regresi.....	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Logistik.....	79
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Corporate Structure Tree	28
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	54

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang dilihat dari ukuran dewan direksi, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, transaksi pihak berelasi, dan koneksi politik yang dilihat dari kepemilikan pemerintah, dan dewan yang terkoneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan industri ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan berhasil mengumpulkan 34 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan frekuensi rapat komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, sedangkan transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif, dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh. Koneksi politik yang diproksikan dengan kepemilikan pemerintah dan dewan yang terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Penambahan variabel kontrol yaitu pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini memberikan perspektif terbaru dan referensi evaluasi kepada perusahaan dan regulator mengenai potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan di industri ekstraktif Indonesia yang dilihat dari tata kelola perusahaan dan koneksi politik.

Kata kunci: potensi kecurangan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, koneksi politik

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of corporate governance as seen from the size of the board of directors, the frequency of audit committee meetings, managerial ownership, related party transactions, and political connections as seen from government ownership, and politically connected boards on the potential for financial statement fraud in extractive industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018-2023. Sampling using the purposive sampling method and successfully collected 34 companies. The analysis used is logistic regression analysis. The results of this study indicate that corporate governance as proxied by the frequency of audit committee meetings and managerial ownership has a positive effect on the potential for financial statement fraud, while related party transactions have a negative effect, and the size of the board of directors has no effect. Political connections as proxied by government ownership and politically connected boards have a negative effect on the potential for financial statement fraud. The addition of control variables, namely company growth has a positive effect on the potential for financial statement fraud, while company size has no effect. The results of this study provide the latest perspectives and evaluation references to companies and regulators regarding the potential for financial statement fraud in companies in the Indonesian extractive industry as seen from corporate governance and political connections.

Keywords: *potential for financial reporting fraud, corporate governance, political connections*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan memegang peran penting dalam hal transparansi dan akuntabilitas atas aktivitas ekonomi perusahaan. Peran pelaporan keuangan secara luas adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. SFAC Nomor 1 paragraf 34 telah menegaskan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini dan calon investor serta pengguna lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa yang rasional. Selain itu, SFAC Nomor 1 paragraf 50 juga menyatakan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen suatu perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaannya kepada pemilik (*stockholder*) atas penggunaan sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Oleh sebab itu, laporan keuangan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Laporan keuangan tidak hanya menyediakan informasi keuangan berupa data numerik, tetapi juga informasi non-keuangan berupa data non-numerik pada segmen non-keuangan. Afriyanto (2016) berpendapat bahwa baik informasi keuangan maupun non-keuangan dapat mengurangi risiko

kegagalan manajer dalam mempertimbangkan dimensi yang relevan. Adapun, informasi non-keuangan memuat semua informasi terkait tata kelola perusahaan yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui bagaimana seharusnya atribut tata kelola perusahaan disusun demi kepentingan terbaik mereka. Praktik tata kelola perusahaan dapat membantu mendeteksi dan mengurangi aktivitas kecurangan (Hassan *et al.*, 2023). Meskipun banyak perusahaan telah memiliki atribut tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan masih menghadapi risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Praktik kecurangan laporan keuangan merupakan ancaman serius pada kepercayaan pelaku pasar terhadap informasi keuangan, estimasi keberlanjutan perusahaan, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, palsu, dan ilegal. Menurut *Associate of Certified Fraud Examine* (ACFE), kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai tindakan memanipulasi informasi yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan yang dirilis ke publik dan institusi keuangan. Kecurangan laporan keuangan perusahaan telah menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Berdasarkan data ACFE dalam *Occupational Fraud 2022: a Report to the Nations*, tercatat 23% *fraud* terjadi di level *owner* dan eksekutif, 39% terjadi di level manajer, dan 36% terjadi di level *employee*. Lebih lanjut, rata-rata kerugian terbesar terjadi pada level *owner* dan eksekutif yakni sebesar USD 500.000, kemudian diikuti pada level manajer dan *employee* masing-masing sebesar

USD 100.000 dan USD 50.000. Jadi dapat disimpulkan, meskipun secara persentase jumlah kasus kecurangan pada level manajemen puncak lebih kecil, namun nilai kerugian yang dapat ditimbulkan merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan di level *employee*. Manajemen puncak memiliki kendali dan kemampuan terkait bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan, termasuk bagaimana laporan keuangan disusun. Hal ini menimbulkan pertanyaan efektivitas komponen tata kelola perusahaan diterapkan guna mendeteksi potensi dan meminimalisir risiko kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan adalah masalah global yang mempengaruhi berbagai bisnis dengan dampak negatif yang parah terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan terkait (Craja *et al.*, 2020). Secara khusus, kecurangan laporan keuangan pada negara berkembang memiliki berbagai konsekuensi negatif utama seperti kehilangan pekerjaan, tuntutan pidana, dan penurunan kapitalisasi pasar (Tsegba & Upaa, 2015), di tengah tingginya tingkat pengangguran dan masyarakat yang belum siap kehilangan pekerjaan. Kondisi ini sejalan dengan catatan ACFE dalam Occupational Fraud 2022 bahwa Indonesia berada di peringkat empat sebagai negara di Asia Pasifik dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak yakni 23 kasus pada tahun 2022. Risiko kecurangan yang terjadi tidak hanya dari bagaimana kondisi regulasi terkait tata kelola perusahaan di Indonesia dan bagaimana regulator bekerja, tetapi juga faktor-faktor lain, misalnya

koneksi politik. Hal ini semakin memperkuat pentingnya penelitian lebih lanjut terkait efektivitas atribut tata kelola perusahaan.

Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengharuskan terpenuhinya tata kelola perusahaan yang baik, dan juga harus disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK ini memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik. Pasal 9 dalam POJK ini secara khusus menekankan kewajiban mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Lima aspek Tata Kelola perusahaan terbuka meliputi: a) Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham; b) Fungsi dan Peran Dewan Komisaris; c) Fungsi dan Peran Direksi; d) Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan e) Keterbukaan Informasi. Peneliti secara khusus ingin mengeksplorasi efektivitas fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dan komite audit, serta hubungan perusahaan dengan pemegang saham atau dalam hal ini kepemilikan manajerial. Sering kali atribut pengawasan hanya disusun untuk memenuhi

peraturan tata kelola perusahaan. Misalnya, perusahaan memutuskan jumlah dewan komisaris tidak didasarkan pada alasan rasional dalam hal tata kelola, namun hanya untuk memenuhi jumlah minimal dewan komisaris dalam perusahaan. Dalam hal frekuensi rapat komite audit, terdapat dua perspektif yang ingin peneliti eksplorasi. Perspektif pertama, frekuensi rapat komite audit merupakan salah satu indikator bekerjanya fungsi pengawasan dalam internal perusahaan. Perspektif kedua, frekuensi rapat komite audit justru menjadi indikasi tingginya risiko kecurangan yang direspon oleh komite audit. Dalam hal kepemilikan manajerial juga terdapat dua perspektif yang ingin peneliti eksplorasi. Perspektif pertama, kepemilikan manajerial dapat menekan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal karena mengurangi intensi agen melakukan tindakan tidak etis yang dapat berdampak negatif pada perusahaan. Perspektif kedua, kepemilikan manajerial justru memberikan hak lebih besar dalam hal pengambilan keputusan dalam perusahaan oleh agen sehingga memberikan peluang lebih besar pada intensi oportunistik untuk kepentingan pribadi karena fungsi *check & balances* tidak berjalan. Selain itu, fakta bahwa meskipun terdapat peraturan yang secara spesifik mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Pasifik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh the Asian Corporate Governance Association (ACGA) dan CLSA Limited (CLSA) yang dipublikasikan dalam 11th biennial CG Watch 2023 melaporkan bahwa

Indonesia berada pada peringkat terakhir (nilai persentase 35,7) dari dua belas negara yang dilakukan survei sejalan dengan meningkatnya korupsi dan *inside trader*. Sangat jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (nilai persentase 64,6) dan Malaysia (nilai persentase 61,5) yang masing-masing menempati peringkat dua dan lima. Posisi Indonesia dalam kinerja tata kelola dan ESG menurut survei ini bahkan tidak berubah bila dibandingkan tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat masalah pada tata kelola perusahaan di Indonesia, di mana pada gilirannya akan memunculkan risiko terjadinya kecurangan, salah satunya yakni kecurangan laporan keuangan.

Tata Kelola Perusahaan berisi seperangkat mekanisme pengendalian internal seperti prosedur, peraturan yang disetujui, kebijakan, dan harus digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan mereka berfungsi lebih sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah diatur sebelumnya (Castrillón, 2021). Manajemen puncak memiliki peran vital dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung akuntabilitas dan transparansi perusahaan sehingga menurunkan risiko kecurangan laporan keuangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasir *et al.* (2019), atribut tata kelola perusahaan harus dipertimbangkan dalam upaya perusahaan mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan.

Bagian lain dalam tata kelola perusahaan yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan adalah transaksi pihak berelasi. Terdapat dua perspektif dalam melihat transaksi pihak berelasi. Perspektif pertama,

transaksi pihak berelasi merupakan konflik kepentingan yang membahayakan tanggung jawab agensi manajemen kepada pemegang saham serta fungsi pemantauan direktur. Perspektif kedua, transaksi pihak berelasi merupakan transaksi efisien yang memenuhi tuntutan ekonomi rasional suatu perusahaan seperti kebutuhan akan penyedia layanan dengan pengetahuan khusus perusahaan yang mendalam. Peneliti secara khusus ingin mengeksplorasi perspektif pertama bahwa transaksi pihak berelasi menimbulkan konflik kepentingan yang membahayakan tanggung jawab agensi kepada prinsipal. Transaksi antara perusahaan dan manajer, direktur, pemilik utama, atau afiliasinya sendiri dikenal sebagai transaksi pihak terkait. Transaksi pihak berelasi sering kali mengandung hak atau kondisi istimewa merupakan tantangan tata kelola perusahaan. Selain itu, tingginya transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif menimbulkan keingintahuan peneliti terhadap dampaknya pada potensi kecurangan laporan keuangan.

Industri ekstraktif (*extractive industry*) merupakan industri yang mengambil bahan baku mentah dari alam, seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, tembaga, dan mineral lainnya. Secara khusus, penelitian ini menyoroti tingginya risiko kecurangan pada perusahaan di industri ekstraktif yang mungkin didasari oleh inefektivitas tata kelola perusahaan atas kompleksitas bisnis, transaksi pihak terkait, struktur kepemilikan saham, dan koneksi politik. Peraturan spesifik, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dibuat guna memastikan perusahaan-perusahaan di industri ekstraktif menjalankan dan melaporkan kegiatan usaha sesuai ketentuan guna mencegah kecurangan. Faktanya, kasus kecurangan pada perusahaan di industri ekstraktif masih sering terjadi.

Lemaitre (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa meskipun proses tender diterapkan secara adil dan transparan, tingkat kecurangan di industri ekstraktif masih tinggi. Ia melanjutkan, dalam beberapa kasus proses tender terbuka dialihkan untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat publik dan menyembunyikan hasil korupsi, sementara dalam kasus-kasus lain, kriteria evaluasi dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan perusahaan dengan kepemilikan manfaat yang dirahasiakan dan terkait dengan orang-orang yang memiliki hubungan politik. Dari sisi laporan keberlanjutan, Kwarto *et al.* (2024) dalam penelitiannya menunjukkan beberapa perusahaan hulu migas global masih memiliki potensi bias dalam pelaporan keberlanjutan karena belum menerapkan konsep *triple bottom line*. Namun

perusahaan sebagai kelompok penguasa tetap dapat menjalankan misi hegemoninya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mengingat bahwa industri ekstraktif khususnya sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki risiko kecurangan tinggi, penting bagi peneliti untuk memeriksa efektivitas tata kelola perusahaan di industri ini untuk mendeteksi potensi kecurangan dan menyusun atribut tata kelola perusahaan demi menekan risiko kecurangan.

Di Indonesia, proses bisnis di industri ekstraktif sangat erat dengan proses perizinan yang melibatkan berbagai level pejabat di pemerintahan. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan dengan cara pengajuan permohonan wilayah oleh badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Hubungan antara pelaku bisnis di industri ekstraktif dan pemerintah inilah yang disinyalir memungkinkan adanya kesepakatan-kesepakatan yang tidak transparan termasuk melakukan tindakan kecurangan. Skema korupsi selalu terkait dengan skema penyalahgunaan aset dan juga skema kecurangan laporan keuangan (Febriandani & Utomo, 2022). Kasus korupsi pejabat publik menjadi bukti pentingnya memeriksa potensi kecurangan laporan keuangan untuk mencegah tindakan kecurangan yang lebih besar. Penelitian Labolo *et al.* (2023) menyatakan bahwa lima

peringkat tertinggi korupsi menurut profesi/jabatan adalah Swasta dengan 287, Anggota DPR & DPRD 257, Eselon I/II/III 213, Lainnya 141 dan Walikota/Bupati dan Wakil 115. Posisi teratas membuat pegawai di tingkat bawah juga terjerat dalam pusaran korupsi. Di saat yang sama, manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk menutupi tindakan kecurangannya. Temuan ini turut menjadi latar belakang peneliti untuk menguji lebih lanjut pengaruh koneksi politik di industri ekstraktif dengan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Kasus kecurangan PT Timah Tbk (2015-2022), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan seperti timah, batu bara, dan nikel dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TINS sejak 19 Oktober 1995. Perusahaan ini juga dimiliki sebagian sahamnya oleh pemerintah Indonesia melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID). Mengutip Siaran Pers Indonesia Corruption Watch (2024), kasus tersebut mayoritas melibatkan manajemen puncak di level direktur perusahaan smelter, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kecurangan di sektor pertambangan melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan di level daerah hingga pusat untuk melancarkan praktik kecurangan mereka. Bisnis pertambangan sering dilakukan dengan skema kerja sama dengan banyak pihak terkait di bidang perusahaan pertambangan, misalnya penambang skala kecil di dalam area IUP perusahaan. Pendapatan dan laba paling banyak dimanipulasi pada perusahaan yang melibatkan transaksi pihak terkait (Kabwe, 2023), meskipun perusahaan tersebut telah memiliki

struktur tata kelola perusahaan yang sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan di industri ekstraktif dipilih karena terbatasnya penelitian terbaru setidaknya lima tahun terakhir yang secara khusus menyoroti permasalahan tata kelola dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan di industri ini. Lebih lanjut, perusahaan di industri ekstraktif merupakan perusahaan pengelola sumber daya yang melakukan aktivitas transaksi ekonomi dengan berbagai pihak, seperti pemasok, kreditur, pelanggan, investor, dan sangat erat hubungannya dengan regulator yang dalam hal ini adalah pemerintah, khususnya terkait aktivitas eksplorasi, operasi, dan pengakuan cadangan sumber daya alam pada laporan keuangan. Tingginya keterkaitan pemerintah pada industri ini turut memunculkan risiko adanya koneksi politik untuk menutupi tindakan kecurangan laporan keuangan. Sebagaimana diungkapkan Hashim *et al.* (2020), terdapat risiko terjadinya kecurangan yang tinggi di perusahaan-perusahaan yang melibatkan transaksi dengan berbagai pemasok, pemerintah, pelanggan, dan pemegang saham bahkan ketika prosedur operasi standar dan peraturan serta regulasi sudah ada. Lebih lanjut, praktik kecurangan perusahaan-perusahaan di sektor energi meningkat sejalan dengan kuatnya ketergantungan pada lokasi sumber daya sebagaimana usaha monopolistik (*monopolistic nature of the undertaking*), keputusan politik, dan belanja pemerintah (*public procurement*) (Rimšaitė, 2019).

Bertrand *et al.* (2018) mengemukakan bahwa potensi kerugian lebih tinggi dari koneksi politik bagi perusahaan yang tidak diimbangi dengan manfaat lainnya. Misalnya, direksi yang memiliki koneksi politik mengubah keputusan ketenagakerjaan perusahaan untuk membantu politisi dalam upaya mereka untuk terpilih kembali dengan menciptakan lapangan kerja dan tingkat penciptaan pabrik yang lebih tinggi, serta tingkat kehancuran yang lebih rendah pada tahun-tahun pemilu, terutama di wilayah yang diperebutkan secara politik. Di sisi lain, hanya ada sedikit bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan keuntungan dari akses istimewa terhadap sumber daya pemerintah, seperti subsidi atau pembebasan pajak. Selain itu, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan juga perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami bagaimana atribut tata kelola perusahaan seharusnya dijalankan, khususnya atribut yang sangat dekat dengan perusahaan di industri ekstraktif, yaitu ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, transaksi pihak terkait.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *gap* pada penelitian Firdarini (2023), Tarjo *et al.* (2023), dan Kabwe (2023) yang melakukan penelitian pada perusahaan di industri ekstraktif khususnya perusahaan pertambangan namun variabel yang digunakan masih terbatas, yaitu profitabilitas, likuiditas, arus kas, dan transaksi pihak terkait. Selain itu, bukti empiris pada penelitian terkait dampak koneksi politik dalam suatu perusahaan di Indonesia juga masih terbatas khususnya terhadap kecurangan laporan

keuangan, mengingat banyaknya kasus kecurangan perusahaan di industri ekstraktif, misalnya PT Bumi Resources Tbk, dan yang terbaru PT Timah Tbk. Selain masih tingginya kasus kecurangan yang terjadi di industri ini, industri ekstraktif dipilih sebagai kajian.

Penelitian ini akan menggunakan Model Beneish yang memiliki presisi lebih tinggi dan tingkat kesalahan lebih kecil untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan dibandingkan Model Dechow (Kaab Omeir *et al.*, 2023). Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan efektivitas tata kelola perusahaan dan koneksi politik di industri ekstraktif. Permasalahan efektivitas tata kelola perusahaan akan dikaji dengan memperluas proksi pengukuran tata kelola perusahaan melalui beberapa variabel seperti ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan transaksi pihak terkait. Kemudian penelitian ini akan melakukan pengujian koneksi politik dengan proksi kepemilikan pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris pada kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan sehingga memperluas literatur terbaru khususnya terkait kajian kecurangan pada perusahaan di industri ekstraktif. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan” dengan objek penelitian pada perusahaan di industri ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018-2023.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ingin menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
2. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
4. Apakah transaksi pihak terkait berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
5. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
6. Apakah koneksi politik dewan komisaris dan/atau direksi berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak terkait sebagai proksi tata kelola perusahaan, serta kepemilikan pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris dan/atau direksi sebagai proksi koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini didesain untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terkait tata kelola perusahaan, koneksi politik, dan kecurangan laporan keuangan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan ke dalam proksi dan/atau cakupan penelitian yang lebih luas, atau secara khusus lebih dalam memeriksa hubungan koneksi politik terhadap tindakan kecurangan di Indonesia, tidak terbatas hanya pada dampaknya terhadap kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hubungan tata kelola perusahaan dan koneksi politik dengan kecurangan laporan keuangan perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memperhatikan risiko dari adanya koneksi politik sehingga dapat menekan kecurangan pelaporan keuangan.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator khususnya di industri ekstraktif bahwa aspek tata kelola

perusahaan dan koneksi politik sangat penting dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan yang lebih jelas dan ketat guna mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh proksi variabel independen yang sangat dekat dengan industri ekstraktif, yaitu tata kelola perusahaan antara lain ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, transaksi pihak terkait, serta koneksi politik antara lain kepemilikan pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan (*theory agency*) merupakan salah satu teori dasar yang dapat menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (*agency relationship*). Oleh sebab itu, teori ini erat hubungannya dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam penelitiannya yang berjudul “*Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*” menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan suatu kontrak di mana salah satu atau lebih pemilik melibatkan agen agar memperhatikan pekerjaan untuk kepentingan mereka dengan cara mendelegasikan pengambilan keputusan.

Prinsipal dalam teori ini diperankan oleh pemegang saham (*shareholder*) atau pemilik (*owner*) perusahaan, dan agen diperankan oleh orang-orang pada posisi manajemen perusahaan seperti direksi perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan kontrol atas manajemen suatu perusahaan tersebut dapat meningkatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen (Fama

& Jensen, 1983). SFAC Nomor 1 menyatakan bahwa manajemen mengetahui lebih banyak hal terkait perusahaan dan hubungannya dengan investor, kreditur, atau pihak luar (*outsider*) dan dapat meningkatkan kegunaan informasi keuangan dengan mengidentifikasi transaksi tertentu, peristiwa lain, dan keadaan yang berdampak pada perusahaan dan menjelaskan dampak keuangannya. Besarnya kemampuan dan pengetahuan manajemen puncak terhadap perusahaan inilah yang memunculkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan pengetahuannya untuk melakukan kecurangan, salah satunya kecurangan laporan keuangan.

Dalam kondisi ideal, segala keputusan dan tindakan terkait bisnis oleh manajemen puncak harus dimaksudkan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham (pemilik). Menurut Ali (2020), pemilik (*principal*) menyediakan modal sehingga menanggung tingkat risiko, dan mempekerjakan manajer (*agent*) untuk melaksanakan tata kelola perusahaan. Struktur dewan direksi (*board of directors*) menyediakan mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan secara vital dalam menyediakan panduan dan penentu kebijakan jalannya bisnis perusahaan dan bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa manusia memiliki sifat dasar yakni sifat oportunistik yang dapat mempengaruhi berbagai keputusan dan tindakannya.

Onjewu *et al.* (2023) menjelaskan bahwa teori agensi didukung oleh tujuh asumsi mendasar motivasi intrinsik manusia, yaitu kepentingan pribadi (*self-interest*), tujuan yang bertentangan (*conflicting goals*), timbulnya rasionalitas terbatas atau dengan kata lain manusia memiliki keterbatasan daya pikir tentang persepsi masa depan (*bounded rationality*), asimetri informasi (*information asymmetry*), keunggulan efisiensi (*pre-eminence of efficiency*), kecenderungan menghindari risiko (*risk aversion*), dan pengelolaan informasi sebagai komoditas (*information as a commodity*). Oleh sebab itu, apabila didasarkan pada asumsi dasar manusia di atas, pemegang posisi manajemen puncak perusahaan yang juga sebagai manusia akan mengutamakan kepentingan pribadinya (*opportunistic*) dalam menjalankan tata kelola perusahaan secara kontraktual (Pomegbe *et al.*, 2021), misalnya dengan membuat keputusan atau tindakan demi memaksimalkan kepentingan sendiri melalui kecurangan laporan keuangan.

Admati (2017) menyatakan bahwa pemisahan fungsi secara hukum dalam perusahaan dapat memperburuk konflik kepentingan. Misalnya, manajemen puncak yang berperilaku tidak etis atau tidak sesuai dengan standar etika perusahaan, dan manajer yang mengutamakan kepentingan diri sendiri mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal, misalnya kecurangan laporan keuangan untuk meningkatkan kekayaan mereka sendiri sehingga merugikan atau

mengurangi kekayaan pemilik perusahaan. Hal ini merupakan permasalahan penting yang ingin diselesaikan dengan upaya pemenuhan *good corporate governance*. Oleh sebab itu, teori keagenan dapat digunakan sebagai pemahaman dasar terkait tata kelola perusahaan dan kecurangan laporan keuangan perusahaan.

2.1.2. Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas cenderung berfokus pada opini, keputusan, atau perilaku yang terkait dengan isu moral atau etika. Menurut Dose & Klimoski (1995), akuntabilitas pada dasarnya menyiratkan antisipasi terhadap "akuntansi", harus melaporkan atau menjelaskan diri sendiri kepada orang lain di masa mendatang. Teori akuntabilitas juga dapat menjelaskan hubungan agen dan prinsipal (selain teori keagenan). Teori akuntabilitas menekankan konsekuensi menghadapi akuntansi, biasanya dengan asumsi bahwa kondisi yang harus dihadapi oleh agen ditentukan oleh prinsipal. Sehingga peran prinsipal sangat dominan dalam hal pengawasan termasuk akses terhadapnya.

Mengutip bagan akuntabilitas konvensional oleh Dose & Klimoski (1995), kontrol birokrasi memiliki peran pengawasan yang sangat penting. Meskipun peran pengawasan biasanya dijalankan oleh struktur birokrasi tertentu, misalnya OJK untuk perusahaan

publik, namun pengawasan yang lebih dekat dapat dicapai apabila pemerintah memiliki akses langsung terhadap perusahaan.

Koneksi politik terbentuk di mana pemerintah menjadi bagian dari pemilik saham suatu perusahaan (Zhang, 2018). Pengawasan yang lebih tinggi oleh pemerintah pada suatu perusahaan dapat terwujud salah satunya dengan pemerintah yang turut memiliki saham perusahaan. Berdasarkan teori akuntabilitas, pemerintah sebagai pemegang saham suatu perusahaan publik memungkinkan mereka melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan sehingga pada gilirannya menekan potensi kecurangan laporan keuangan. Pemerintah sebagai prinsipal tidak ingin ada risiko lebih besar pada terjadinya tindakan tidak etis manajemen perusahaan yang dapat mempengaruhi citra atau opini publik baik terhadap perusahaan maupun pemerintah, terutamaantisipasi tidak tercapainya akuntabilitas akuntansi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Namun penulis memberikan catatan khusus, bahwa apa yang tidak terlihat dalam sebagian besar teori akuntabilitas adalah pengaruh yang mungkin dimiliki agen (secara individu). Sehingga dari sudut pandang teori akuntabilitas hubungan agen dan prinsipal dilihat dari hubungan antara pemerintah sebagai pemegang saham perusahaan atau prinsipal, dan manajemen perusahaan sebagai agen.

Berdasarkan teori akuntabilitas, akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur institusional yang membuat pemerintah memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan (Hussain & Moriarty, 2018). Kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan dan menjaga manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi, mengelola dan melaporkan sumber daya secara akuntabel dan transparan, serta mempertahankan citra perusahaan yang baik dengan mencegah tindakan kecurangan.

2.1.3. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap standar akuntansi yang mungkin mempengaruhi lobi perusahaan terhadap standar akuntansi. Menurut Watts & Zimmerman (1978) dalam penelitiannya yang berjudul "*Toward a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*" menjelaskan bahwa faktor-faktor tertentu diperkirakan mempengaruhi arus kas perusahaan dan pada gilirannya dipengaruhi oleh standar akuntansi. Faktor-faktor ini adalah pajak (*taxes*), peraturan (*regulation*), rencana kompensasi manajemen (*management compensation plans*), biaya pembukuan (*bookkeeping costs*), dan biaya politik (*political costs*). Secara khusus, faktor biaya

politik menjadi dasar teori dalam penelitian ini khususnya pada kaitannya dengan koneksi politik, yakni perusahaan akan mengeksploitasi kebijaksanaan dalam kebijakan akuntansi untuk mengatur munculnya laba yang lebih rendah sebagai respons terhadap peningkatan ancaman biaya politik ini.

Watts & Zimmerman (1978) mengemukakan faktor biaya politik (*political costs*) dapat menjelaskan keterkaitan korporasi dengan sektor politik. Orang-orang yang berada pada jabatan politik atau orang-orang yang memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan antar berbagai kelompok. Korporasi sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan dan karena alasan ini perusahaan mempunyai kontak (aktual atau potensial) dengan pemerintah, secara langsung melalui peraturan (misalnya Komisi Perdagangan Antar Negara) atau pengadaan, atau secara tidak langsung melalui kemungkinan intervensi pemerintah (misalnya antimonopoli, pengendalian harga, dll), dapat mempengaruhi arus kas masa depan mereka dengan menghambat tindakan pemerintah melaporkan pendapatan bersih yang lebih rendah.

Preuss & Königgruber (2021) menyimpulkan dari tinjauan literatur bahwa sedikit penelitian konseptual yang mencoba menentukan bagaimana (melalui saluran mana) perusahaan yang terkoneksi politik mempengaruhi hasil pelaporan keuangan.

Perusahaan yang terkoneksi politik mempengaruhi hasil pelaporan melalui (i) akses yang lebih mudah terhadap sumber daya keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang terhubung, (ii) quid pro quo politik antara perusahaan-perusahaan yang terhubung dan politisi yang terhubung dengan mereka, (iii) dampak terhadap penegakan peraturan akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang terhubung, dan (iv) peningkatan pengawasan media terhadap perusahaan-perusahaan yang terhubung.

2.1.4. Kecurangan Laporan Keuangan

Association of Certified Fraud Examiner (2014) mengklasifikasikan tiga bentuk utama kecurangan (*fraud*), yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Secara khusus, ACFE menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan salah saji yang disengaja (dengan intensi) atau penghilangan fakta material, atau data akuntansi yang menyesatkan dan jika dipertimbangkan dengan semua informasi yang tersedia, akan menyebabkan pembaca laporan keuangan mengubah penilaian atau keputusannya. Skema kecurangan laporan keuangan dapat dibagi menjadi lima klasifikasi umum, yaitu pendapatan fiktif, perbedaan waktu, kewajiban dan biaya tersembunyi, pengungkapan yang tidak tepat, dan penilaian aset yang tidak tepat. Dalam praktiknya, kecurangan laporan keuangan

mungkin melibatkan: a) manipulasi catatan keuangan, b) kesengajaan menghilangkan peristiwa, transaksi, akun, atau informasi penting lainnya yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, atau c) kesalahan penerapan prinsip, kebijakan akuntansi, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan, dan mengungkapkan transaksi bisnis.

Kecurangan laporan keuangan perusahaan biasanya dilakukan oleh orang-orang pada posisi manajemen puncak yang memiliki kapasitas untuk memodifikasi laporan keuangan. Perusahaan mana pun dapat menjadi sarana kecurangan laporan keuangan karena berbagai alasan, dan direkturlah yang merupakan pihak terbaik yang melakukan hal tersebut (Mohamed & Handley-Schachler, 2015).

Motif kecurangan laporan keuangan dapat bervariasi dan teori yang berbeda dapat digunakan untuk menganalisis motif tersebut. Dari sudut pandang keagenan, keandalan laporan keuangan sangat diinginkan oleh pemegang saham, kepentingan publik, dan pasar modal. Oleh sebab itu, untuk menekan kecurangan, pemegang saham merancang tata kelola internal perusahaan secara optimal, misalnya dengan kompensasi manajerial dan pemisahan fungsi pelaksana dan pengawasan (Pagano & Immordino, 2012).

Berdasarkan teori akuntansi positif khususnya terkait biaya politik, politikus dalam membuat kebijakan cenderung

memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan terbaik mereka atau partai mereka berada. Di saat yang sama, perusahaan cenderung akan berusaha memaksimalkan koneksi politik untuk kepentingan perusahaan, namun juga dapat disalahgunakan untuk menjalankan perusahaan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, misalnya menyembunyikan kecurangan laporan keuangan. Ketika kepentingan politikus dan perusahaan yang oportunistik bertemu, risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi, dan pada gilirannya akan merugikan pemilik perusahaan (investor), kreditur, dan reputasi perusahaan itu sendiri.

2.1.5. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah segala sesuatu tentang bagaimana perusahaan publik disusun dan diarahkan (Monks & Minow, 2011:18). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Pengurus menganut sistem dua tingkatan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hubungan yang baik antar struktur perseroan berdampak positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

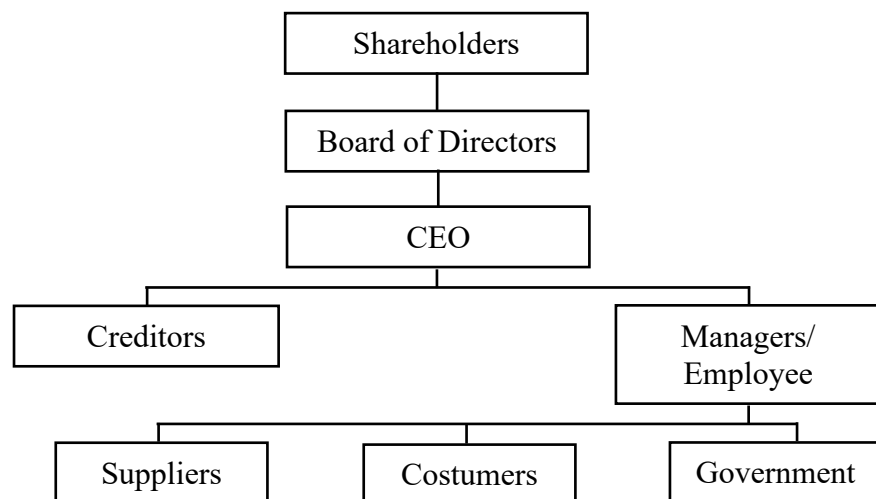
Baik. Selain struktur utama yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, struktur tata kelola dapat memiliki unit pendukung lainnya seperti komite, sekretaris perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). ACFE telah menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik guna mencegah kecurangan dan mengurangi risiko dampak negatif terhadap reputasi perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) merefleksikan dengan baik suatu perusahaan, menarik atensi positif investor, kreditur, dan konsumen. Hal ini tidak lepas dari keterkaitan pihak-pihak tersebut dalam proses bisnis suatu perusahaan seperti yang diilustrasikan dalam *corporate structure tree* menurut ACFE pada Gambar 2.1. *Corporate structure tree* menjelaskan bagaimana sistem *check-and-balances* dalam tata kelola perusahaan memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat membuat semua keputusan bisnis tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Struktur tata kelola perusahaan suatu organisasi memberikan garis akuntabilitas dan pelaporan, mendefinisikan hubungan dan harapan pihak-pihak yang terlibat, serta menetapkan aturan dan praktik yang harus diikuti oleh pihak-pihak tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Pemegang saham berada pada bagian paling atas dalam *corporate structure tree* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk

menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Kemudian di bawah pemegang saham adalah dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku di bidangnya serta menjaga standar etika yang tinggi dalam semua aspek bisnisnya.

Gambar 2.1 Corporate Structure Tree



Sumber: Corporate Governance for Fraud Prevention, ACFE, 2024

Jajaran manajerial mengarahkan organisasi dan karyawan dalam rangka mengatur *ethical tone*, desain kontrol internal, menentukan penggunaan dan pengalokasian sumber daya perusahaan, serta membuat tujuan strategis dan tujuan operasi. Di sisi lain, kreditur biasanya berperan sebagai sumber pendanaan bagi

perusahaan. Manajer divisi atau karyawan akan menghadapi pihak-pihak seperti pemasok, konsumen, dan pemerintah dalam transaksi bisnis yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan pemerintah biasanya manajer akan menentukan bagaimana *best practices* dalam menjalankan operasi tetap sesuai dengan regulasi, atau dengan adanya kerja sama atas Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengarah pada lingkungan yang rawan kecurangan dan berdampak negatif terhadap pemegang saham perusahaan. Lebih lanjut, Dandapani & Shahrokhi (2022) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan bergantung pada mekanisme internal seperti struktur dewan dan insentif bagi manajemen, dan pada mekanisme eksternal seperti lembaga yang menuntut akuntabilitas. Semua mekanisme ini penting karena mekanisme tersebut merupakan inti dari bagaimana dan untuk siapa perusahaan menghasilkan nilai tambah. Selain itu, menurut Hope & Lu (2019), transaksi pihak berelasi juga merupakan bagian dari pengungkapan tata kelola perusahaan. Perusahaan publik harus mengungkapkan kebijakan tata kelola mereka terkait dengan transaksi pihak berelasi. Di Indonesia, peraturan terkait transaksi pihak berelasi secara khusus ditekankan dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Beberapa dekade terakhir, tata kelola perusahaan memperoleh perhatian yang sangat besar oleh publik global maupun domestik karena berperan besar dalam menilai kesehatan ekonomi perusahaan dan sosial secara umum. Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan besar sering kali disebabkan oleh kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Secara khusus, tata kelola perusahaan yang baik penting sebagai mekanisme penurunan kecurangan (Monks & Minow, 2011). Selain itu, perusahaan harus menyadari pentingnya atribut tata kelola dalam menyusun strategi dalam rangka pencegahan kecurangan dan pembentukan reputasi perusahaan, tidak hanya pada pemenuhan regulasi saja.

2.1.6. Koneksi Politik

Koneksi politik (*political connection*) pada perusahaan memiliki definisi yang berbeda-beda. Pertama, apabila dilihat dari manajemen perusahaan, Faccio *et al.* (2006) mendefinisikan sebuah perusahaan memiliki hubungan politik jika setidaknya salah satu pejabat tinggi perusahaan (eksekutif perusahaan, dewan komisaris atau direksi, atau pemegang saham mayoritas (mengendalikan setidaknya 10% dari saham dengan hak suara perusahaan) adalah kepala negara (yaitu, presiden, raja, atau perdana menteri), menteri pemerintah, anggota parlemen nasional, partai politik atau terafiliasi politik.

Beberapa peneliti mendefinisikan koneksi politik didasarkan pada riwayat pekerjaan para manajemen puncak di setiap perusahaan pernah memegang jabatan tinggi di pemerintahan (Fisman & Wang, 2015), CEO atau direksi perusahaan sedang menjabat atau pernah menjabat di pemerintahan atau militer (Wu *et al.*, 2016), salah satu pemegang saham atau pimpinan perusahaan adalah anggota parlemen, menteri atau kepala negara, atau mempunyai hubungan dekat dengan pengurus partai politik (Wati *et al.*, 2019), atau terdapat setidaknya satu dari pemegang saham (mengendalikan setidaknya 10% suara secara langsung atau tidak langsung), anggota dewan atau komisaris merupakan mantan atau saat ini menjabat anggota parlemen, menteri atau kepala pemerintah daerah, politisi atau pejabat partai, anggota militer atau polisi atau pejabat pemerintah (Habib *et al.*, 2017).

Sebagai organ penting dalam perusahaan yang menjalankan peran penting dalam mengelola perusahaan, keterikatan manajemen puncak selain pada kepentingan pemegang saham mungkin terjadi apabila terdapat pengaruh dari jabatan atau kekuasaan lain yang sedang atau pernah dijabatnya, termasuk kepentingan atau jabatan politik dan/atau pemerintahan. Oleh sebab itu, relasi politik pada level eksekutif atau manajemen puncak perusahaan memiliki kecenderungan mempengaruhi bagaimana perusahaan dikelola, termasuk bagaimana laporan keuangan disajikan.

Kedua, apabila dilihat dari kendali pemerintah (sebagai pelaku politik dan pembuat kebijakan publik) melalui kepemilikan saham perusahaan, hubungan politik perusahaan dapat terbentuk dengan sifat kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kepemilikan pemerintah (Zhang, 2018). Sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki hak atau kendali atas bagaimana perusahaan ingin dijalankan, termasuk dewan direksi atau dewan komisaris yang pemerintah inginkan berada dalam perusahaan untuk mewakili kepentingan mereka. Di saat yang sama, pemerintah sebagai pelaku politik dan pembuat kebijakan publik, yang juga memegang saham pada suatu perusahaan, berisiko memanfaatkan kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan arah bagaimana perusahaan dijalankan lebih banyak untuk kepentingan mereka, dibanding pemegang saham lain (non pemerintah, misalnya pemegang saham minoritas yang biasanya investor ritel), dan menggunakan kewenangan politik untuk melancarkan semua upaya guna memaksimalkan keuntungan, termasuk mempermudah *lobbying* dan menutupi tindakan kecurangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan telah menjadi perhatian penting oleh para peneliti selama beberapa dekade terakhir, terlebih lagi pada kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan. Perkembangan dunia

bisnis dan masih adanya risiko praktik kecurangan dari waktu ke waktu terus memunculkan tantangan baru terkait efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan. Selain itu, kaitan koneksi politik di perusahaan pada kasus kecurangan di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut mengingat sering ditemukannya keterlibatan pejabat negara dalam kasus kecurangan. Lebih lanjut, dunia bisnis dan sektor politik memiliki area abu-abu (*gray area*) yang sulit diidentifikasi bagaimana keterkaitan keduanya dan risiko atau dampak yang mungkin ditimbulkan di tengah adanya kepentingan politik dan bisnis, mengingat baik pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki dasar sifat manusia yakni oportunistik.

Penelitian pertama oleh Rostami & Rezaei (2022) yang berjudul “*Corporate Governance Fraudulent and Financial Reporting*” menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap intensi perusahaan dalam melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menelusuri dampak tata kelola perusahaan dan mekanismenya dalam mencegah perusahaan beralih ke pelaporan keuangan yang curang. Mekanisme pencegahan dalam penelitian ini didasarkan pada sembilan mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk independensi dewan, remunerasi dewan, keahlian keuangan CEO, keahlian dalam industri CEO, keahlian keuangan dewan, keahlian industri dewan, upaya dewan, dan kepemilikan manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan, kecuali variabel kompensasi dewan.

Penelitian kedua oleh Girau *et al.* (2022) yang berjudul “*Corporate Governance Challenges and Opportunities in Mitigating Corporate Fraud in Malaysia*” menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan kemungkinan kecurangan perusahaan di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan kompensasi direktur eksekutif berpengaruh negatif terhadap kecurangan perusahaan di Malaysia. Atribut tata kelola perusahaan lain yaitu independensi dewan direksi, frekuensi rapat dewan, dualitas CEO, usia CEO, dan kepemilikan saham oleh direktur dan CEO, tidak berpengaruh terhadap kecurangan perusahaan di Malaysia.

Penelitian ketiga oleh Probohudono *et al.* (2022) yang berjudul “*Governance Structure and the Tendency to Do Financial Statement Fraud*” menguji pengaruh struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari usia direksi, latar belakang pendidikan direksi, jenis kelamin direksi, kepemilikan manajerial, dan keberadaan Dewan Komisaris Independen terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia direksi, jenis kelamin direksi, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian ini tidak menemukan hubungan latar belakang pendidikan direksi dan keberadaan anggota Dewan Komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian keempat oleh Ebaid (2023) yang berjudul “*Board Characteristics and the Likelihood of Financial Statements Fraud*”

Empirical Evidence From an Emerging Market” menguji pengaruh karakteristik dewan direksi (independensi, ukuran, frekuensi rapat, dan keragaman gender) terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan di bursa efek Saudi sebagai salah satu *emerging market*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan, sedangkan ukuran direksi berpengaruh positif. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di dewan direksi dan frekuensi rapat tidak berhubungan dengan kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan.

Penelitian kelima oleh Kamarudin *et al.* (2018) yang berjudul “*Board Member Diversity and Financial Statement Fraud: Malaysia Evidence*” menguji pengaruh keberagaman anggota dewan direksi (gender, etnis, dan keberagaman peran) dan karakteristik tata kelola perusahaan (ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, proporsi direktur independen, dan peran ganda ketua) terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, frekuensi rapat dewan, proporsi direktur independen, dan peran ganda ketua berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan, keberagaman anggota dewan direksi berpengaruh positif.

Penelitian keenam oleh Hartanto (2023) yang berjudul “Pengaruh *Political Connection* dan *Foreign Ownership* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan di Indonesia” menguji pengaruh koneksi politik dan kepemilikan saham investor asing terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik dan kepemilikan saham investor asing berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ketujuh oleh Sudirman *et al.* (2023) yang berjudul “*The Fraud Gone Model and Political Connection – Distribution Approach*” menguji hubungan pengaruh keserakahan, peluang, kebutuhan, dan ekspos terhadap kecurangan pelaporan keuangan dengan menggunakan distribusi koneksi politik sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keserakahan, peluang, kebutuhan, paparan, koneksi politik berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Di saat yang sama, koneksi politik mampu meredam keserakahan, kebutuhan, dan ekspos terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian kedelapan oleh Aulia Haqq & Budiwitjaksono (2020) yang berjudul “*Fraud Pentagon for Detecting Financial Statement Fraud*” menguji target keuangan, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, pemantauan yang tidak efektif, sifat industri, pergantian auditor, pergantian direktur, frekuensi foto CEO (arogansi CEO), koneksi politik, dan eksistensi perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan frekuensi foto CEO berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, target keuangan, tekanan eksternal, pemantauan yang tidak efektif, sifat industri, pergantian auditor, pergantian direktur, koneksi politik, dan eksistensi perusahaan tidak berpengaruh.

Penelitian kesembilan oleh Hidayat & Utami (2023) yang berjudul “*Determinants of Financial Statement Fraud: Political Connections as Moderation*” menguji pengaruh target keuangan, efektivitas pemantauan, pergantian auditor, dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan dengan variabel moderasi koneksi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan efektivitas pemantauan berpengaruh negatif. Pergantian auditor dan koneksi politik tidak berpengaruh. Koneksi politik memperlemah pengaruh efektivitas pemantauan, namun koneksi politik tidak mampu memoderasi target keuangan dan pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. Ringkasan penelitian terdahulu ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil
Rostami & Rezaei (2022)	<p>Variabel independen: tata kelola perusahaan, independensi dewan, remunerasi dewan, keahlian keuangan CEO, keahlian industri CEO, keahlian keuangan dewan, keahlian industri dewan, <i>scope of board efforts</i>, dualitas peran manajemen, kepemilikan manajerial.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan pelaporan keuangan perusahaan.</p>	<p>Independensi dewan, keahlian keuangan CEO, keahlian industri CEO, keahlian keuangan dewan, keahlian industri dewan, <i>scope of board efforts</i>, dualitas peran manajemen, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan remunerasi dewan tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.</p>
Girau <i>et al.</i> (2022)	<p>Variabel independen: ukuran direksi, independensi direksi, frekuensi rapat dewan, dualitas direksi, usia CEO, kepemilikan saham CEO, kepemilikan saham direktor, kompensasi direktor.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan perusahaan.</p>	<p>Ukuran direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan perusahaan. Sedangkan kompensasi direktur berpengaruh negatif terhadap kecurangan perusahaan. Namun, frekuensi rapat dewan, independensi direksi, dualitas direksi, usia CEO, kepemilikan saham CEO, dan kepemilikan saham direktur tidak berpengaruh terhadap kecurangan perusahaan.</p>
Probudono <i>et al.</i> (2022)	<p>Variabel independen: usia direktur, latar belakang pendidikan direktur, proporsi direktur perempuan, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan laporan keuangan.</p>	<p>Usia direktur, proporsi direktur perempuan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, latar belakang pendidikan direktur dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>

Peneliti	Variabel	Hasil
Ebaid (2023)	<p>Variabel independen: independensi dewan, ukuran dewan, frekuensi rapat dewan, keberagaman gender dewan.</p> <p>Variabel kontrol: ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas.</p> <p>Variabel dependen: kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.</p>	<p>Independensi dewan, <i>leverage</i>, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Sedangkan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, frekuensi rapat dewan dan keberagaman gender dewan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan</p>
Kamarudin <i>et al.</i> (2018)	<p>Variabel independen: keberagaman etnis, keberagaman gender dewan, independensi dewan</p> <p>Variabel kontrol: ukuran dewan, ukuran perusahaan.</p> <p>frekuensi rapat dewan, dualitas CEO, <i>leverage</i>, profitabilitas.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan pelaporan keuangan.</p>	<p>Keberagaman etnis, independensi dewan, ukuran dewan, frekuensi rapat dewan, kualitas CEO, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Namun, keberagaman gender dewan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh</p>
Hartanto (2023)	<p>Variabel independen: koneksi politik, kepemilikan asing, ukuran perusahaan.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan laporan keuangan.</p>	<p>Koneksi politik dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>

Peneliti	Variabel	Hasil
Sudirman <i>et al.</i> (2023)	<p>Variabel independen: keserakahan (<i>greed</i>), kesempatan (<i>opportunity</i>), kebutuhan (<i>needs</i>), keterbukaan (<i>disclosure</i>), koneksi politik.</p> <p>Variabel moderasi: koneksi politik.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan laporan keuangan .</p>	<p>Keserakahan, kesempatan, kebutuhan, keterbukaan, dan koneksi politik berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, koneksi politik dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh keserakahan, kebutuhan, dan keterbukaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, koneksi politik tidak dapat memoderasi kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>
Haqq & Budiwijaksono (2020)	<p>Variabel independen: target keuangan, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, pemantauan yang tidak efektif, sifat industri, pergantian direktur, frekuensi foto CEO, koneksi politik, keberadaan perusahaan (<i>company existed</i>).</p>	<p>Stabilitas keuangan dan frekuensi foto CEO berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan target keuangan, tekanan eksternal, pemantauan yang tidak efektif, sifat industri, pergantian direktur, koneksi politik, keberadaan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>
Hidayat & Utami (2023)	<p>Variabel independen: target keuangan, pemantauan yang tidak efektif, pergantian auditor, koneksi politik.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan laporan keuangan.</p>	<p>Target keuangan dan pemantauan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan pergantian auditor dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>

2.3. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, secara khusus Pasal 12 menyatakan bahwa Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kemudian, Pasal 28 menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Sebagaimana ketentuan di atas, dewan komisaris di Indonesia bertugas memastikan perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*). Dewan komisaris disetujui dan diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, jalannya kepengurusan dan bisnis perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi. Sehingga dapat

disimpulkan, peran dewan komisaris sangat vital untuk memastikan perusahaan dijalankan untuk kepentingan terbaik pemegang saham.

Menurut teori agensi, pemisahan kepemilikan dan kontrol atas manajemen suatu perusahaan dapat memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Peran dewan komisaris sangat diperlukan untuk memastikan perusahaan dijalankan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik. Pada kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan, dewan komisaris bersama dengan komite audit akan menjalankan peran pengawasan terhadap elemen-elemen pelaporan keuangan melalui bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan. Oleh sebab itu, ukuran dewan komisaris menjadi instrumen penting dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian Kurnia *et al.* (2024) mengemukakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan memberikan lebih banyak sumber daya bagi perusahaan untuk menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah kecurangan laporan keuangan (Brogi *et al.*, 2021). Oleh sebab itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.2. Frekuensi rapat komite audit terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Komite audit merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertanggungjawab mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan potensi pelanggaran maupun tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, misalnya manajer dan direksi. Tata kelola perusahaan yang baik memerlukan diskusi terbuka antara Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas (Monks & Minow, 2011:442). Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, rapat komite audit sebagai fungsi *monitoring* dapat menjadi fasilitas untuk mencapai hal tersebut melalui keterbukaan informasi yang disampaikan manajer dan/atau direksi. Maka penting untuk tidak memberikan celah baik waktu maupun kesempatan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan melakukan kecurangan dengan meningkatkan frekuensi pengawasan melalui rapat komite audit.

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2025 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit diwajibkan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan setidaknya dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) dari anggota. Pada penelitian ini, rapat komite audit yang dimaksud adalah semua rapat komite audit yang dilaksanakan untuk memantau, mengawasi, dan membahas

informasi keuangan perusahaan agar dapat mendeteksi maupun menindaklanjuti kecurangan. Dalam rapat tersebut, komite audit menelaah dan membahas laporan auditor independen, serta memastikan tidak terdapat perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen, menelaah laporan keuangan kuartalan Perseroan, melakukan kajian pelaksanaan prinsip “*Good Corporate Governance*”, rapat dengan Auditor Internal terkait pengendalian internal, meliputi lingkungan pengendalian proses bisnis, pengendalian risiko, pengawasan, dan *monitoring*, membahas masalah kerja dan hasil temuan auditor internal, melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang telah dilakukan manajemen sehubungan dengan hasil audit yang dilakukan oleh audit internal dan eksternal yang meliputi perbaikan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan/atau membuat usulan kepada Dewan Komisaris terutama berkaitan dengan pengendalian internal.

Teori agensi mengemukakan bahwa kecurangan pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga rapat komite audit diperlukan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Oleh sebab itu, semakin sering rapat komite audit diselenggarakan, maka semakin kecil terjadinya kecurangan laporan keuangan. Rapat komite audit yang lebih sering mungkin menghasilkan tingkat pengawasan yang lebih

tinggi karena komite audit dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan tugasnya. Penelitian Purwiyanti & Laksito (2022) dan Kaituko *et al.* (2023) mengemukakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.3. Kepemilikan manajerial terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) merupakan keikutsertaan individu yang aktif dalam proses pembuatan keputusan di perusahaan, umumnya direksi dan komisaris, menjadi bagian dari pemilik saham perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, konflik keagenan berasal dari kecenderungan manajer untuk mengambil keuntungan tambahan dari sumber daya perusahaan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat menjadi insentif untuk mendorong manajer mencurahkan upaya terbaiknya bagi perusahaan.

Banyak penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial akan mendorong kinerja manajer dalam memenuhi ekspektasi pemegang saham karena mereka juga menjadi

pemilik saham perusahaan. Dengan kata lain, kondisi ini membantu mengurangi motivasi manajer untuk meningkatkan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham (Rostami & Rezaei, 2022). Manajer akan terdorong untuk berkeinginan memiliki informasi terpercaya karena akan mempengaruhi hasil investasinya (sebagai pemegang saham), sehingga manajer akan berusaha mencegah terjadinya perilaku curang dengan menyajikan keterbukaan informasi yang tepat dalam laporan keuangan.

Penelitian Probohudono *et al.* (2022), Nurcahyono *et al.* (2021), dan Kusuma & Fitriani (2020) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen menjalankan perannya sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Oleh sebab itu, hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.4. Transaksi pihak berelasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan bisnis oleh pihak

berelasi (*related party*) yang mempunyai hubungan istimewa dan memiliki tujuan tertentu, sehingga risiko salah saji material menjadi lebih tinggi daripada transaksi dengan pihak tidak berelasi (*unrelated party transaction*) (Yendrawati & Hernanda, 2022).

Teori keagenan dapat menjelaskan pengaruh transaksi pihak terkait dengan risiko kecurangan laporan keuangan. Transaksi pihak berelasi menimbulkan konflik kepentingan yang membahayakan tanggung jawab agensi kepada prinsipal. Transaksi antara perusahaan dan manajer, direktur, pemilik utama, atau afiliasinya sendiri dikenal sebagai transaksi pihak terkait. Transaksi pihak berelasi sering kali mengandung hak atau kondisi istimewa merupakan tantangan tata kelola perusahaan. Selain itu, tingginya transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif menimbulkan keingintahuan peneliti terhadap dampaknya pada potensi kecurangan laporan keuangan.

Transaksi pihak berelasi juga sering dijadikan cara untuk pengalihan atau pemindahan kekayaan (*tunneling*) dari pemegang saham untuk kepentingan atau keuntungan pribadi (Habib *et al.*, 2017). Lebih lanjut, perusahaan menggunakan transaksi pihak berelasi untuk memanipulasi laporan keuangan (Kabwe, 2023). Kecenderungan transaksi pihak berelasi yang dilakukan sebagai salah satu metode untuk memanipulasi laporan keuangan pada gilirannya akan meningkatkan risiko konflik kepentingan.

Penelitian Daresta & Suryani (2022) mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, semakin kompleks transaksi pihak berelasi, maka semakin parah manipulasi laporan keuangan yang dilakukan. Oleh sebab itu, hipotesis keenam yang diajukan adalah:

H4: Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.5. Kepemilikan pemerintah terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Kepemilikan pemerintah (*government ownership*) merupakan kondisi dimana pemerintah menjadi bagian dari pemilik saham suatu perusahaan. Hubungan politik pemilik dapat diproksikan dengan sifat kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kepemilikan pemerintah (Zhang, 2018). Ketika hubungan politik dibangun melalui kepemilikan parsial oleh badan pemerintah, penegakan hukum yang lebih lunak akan diimbangi dengan adanya konflik insentif dari pemerintah sebagai pemungut pajak (Preuss & Königsgruber, 2021). Hubungan politik yang terbentuk antara kepentingan pemerintah dan sektor korporasi ini memungkinkan intervensi pemerintah untuk melakukan kontrol atau kendali atas suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap

manajemen, termasuk bagaimana sumber daya perusahaan dikelola dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

Koneksi politik terbentuk dimana pemerintah menjadi bagian dari pemilik saham suatu perusahaan (Zhang, 2018). Pengawasan yang lebih tinggi oleh pemerintah pada suatu perusahaan dapat terwujud salah satunya dengan pemerintah yang turut memiliki saham perusahaan. Berdasarkan teori akuntabilitas, pemerintah sebagai pemegang saham suatu perusahaan publik memungkinkan mereka melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan sehingga pada gilirannya menekan potensi kecurangan laporan keuangan. Pemerintah sebagai prinsipal tidak ingin ada risiko lebih besar pada terjadinya tindakan tidak etis manajemen perusahaan yang dapat mempengaruhi citra atau opini publik baik terhadap perusahaan maupun pemerintah, terutamaantisipasi tidak tercapainya akuntabilitas akuntansi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Namun penulis memberikan catatan khusus, bahwa apa yang tidak terlihat dalam sebagian besar teori akuntabilitas adalah pengaruh yang mungkin dimiliki agen (secara individu). Sehingga dari sudut pandang teori akuntabilitas hubungan agen dan prinsipal dilihat dari hubungan antara pemerintah sebagai pemegang saham perusahaan atau prinsipal, dan manajemen perusahaan sebagai agen.

Akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur institusional yang membuat pemerintah memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan (Hussain & Moriarty, 2018). Kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan dan menjaga manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi, mengelola dan melaporkan sumber daya secara akuntabel dan transparan, serta mempertahankan citra perusahaan yang baik dengan mencegah tindakan kecurangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Liang *et al.*, 2023; Ababneh & Aga, 2019; dan Wu *et al.*, 2016). Pemerintah yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip keadilan dan transparansi akan turut mendorong perusahaan, di mana terdapat kepemilikan pemerintah, untuk memastikan pengawasan manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi termasuk insentif positif atas perilaku etis manajemen (Ruhnka & Boerstler, 1998), akses informasi dan sumber daya berkelanjutan (Boso *et al.*, 2017), serta memastikan kepercayaan dan reputasi publik yang baik karena perusahaan yang dimiliki pemerintah cenderung menjadi perhatian media kritis (Preuss & Königgruber, 2021), masyarakat umum, dan organisasi atau forum sosial, hingga mendorong penyajian laporan keuangan yang berkualitas (Ababneh

& Aga, 2019). Oleh sebab itu, hipotesis ketujuh yang diajukan adalah:

H₅: Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.6. Koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Faccio *et al.* (2006) mendefinisikan sebuah perusahaan memiliki hubungan politik jika setidaknya salah satu pejabat tinggi perusahaan (eksekutif perusahaan, dewan komisaris atau direksi, atau pemegang saham mayoritas (mengendalikan setidaknya 10% dari saham dengan hak suara perusahaan) adalah kepala negara (yaitu, presiden, raja, atau perdana menteri), menteri pemerintah, anggota parlemen nasional, partai politik atau terafiliasi politik. Individu politik memiliki peran penting dalam dunia usaha seiring banyaknya politisi yang juga berkecimpung di dunia usaha, begitu sebaliknya, pengusaha yang juga berkecimpung di dunia politik. Drutman (2015:133) dalam bukunya yang berjudul “*The Business of America Is Lobbying: How Corporations Became Politicized and Politics Became More Corporate*” mengemukakan bahwa:

“Ketika manajer perusahaan mulai menaruh perhatian pada politik, mereka belajar mempertajam kepentingan politik mereka. Mereka juga mulai memperhatikan perkembangan politik, menjadi lebih sadar akan ancaman dan peluang. Lebih banyak informasi tentang politik berarti lebih banyak alasan untuk berpartisipasi.”

“Ketika perwakilan perusahaan telah membangun hubungan dengan pejabat kongres dan pengambil keputusan lainnya, perusahaan dapat menjadi lebih ambisius dalam keterlibatan politik mereka. Semua ini membuat biayanya tampak lebih rendah dan manfaatnya tampak lebih besar”

Seperti dua mata pisau, koneksi politik dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk mencapai kepentingan terbaik bagi pemegang saham perusahaan, di sisi lain koneksi politik juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi manajemen dengan cara menyamarkan tindakan kecurangan melalui koneksi politiknya. Menurut Drutman (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa koneksi politik mendorong para manajer melakukan lobi (*lobbying*) dan membantu menunjukkan (dan terkadang bahkan menciptakan) peluang baru untuk melakukan lobi. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung terlibat dalam kecurangan (Cordis, 2023), mengurangi kualitas laba dan mendorong agresivitas pajak (Amara & Khlif, 2020).

Watts & Zimmerman (1978) mengemukakan faktor biaya politik (*political costs*) dapat menjelaskan keterkaitan korporasi dengan sektor politik. Orang-orang yang berada pada jabatan politik atau orang-orang yang memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan antar berbagai kelompok. Korporasi sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan dan karena alasan ini perusahaan mempunyai kontak dengan

pemerintah, secara langsung melalui peraturan (misalnya Komisi Perdagangan Antar Negara) atau pengadaan, atau secara tidak langsung melalui kemungkinan intervensi pemerintah (misalnya antimonopoli, pengendalian harga, dll), dapat mempengaruhi arus kas masa depan mereka dengan menghambat tindakan pemerintah melaporkan pendapatan bersih yang lebih rendah.

Penelitian Maulidi *et al.* (2023) menunjukkan bahwa CEO yang memiliki koneksi politik yang kuat memiliki kontribusi dominan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, mengingat sifat oportunistik manusia, melalui kemudahan perusahaan memperoleh kontrak pemerintah (Brugués *et al.*, 2024), dan kecurangan laporan keuangan (Sudirman *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, hipotesis ketujuh yang diajukan adalah:

H₆: Koneksi politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

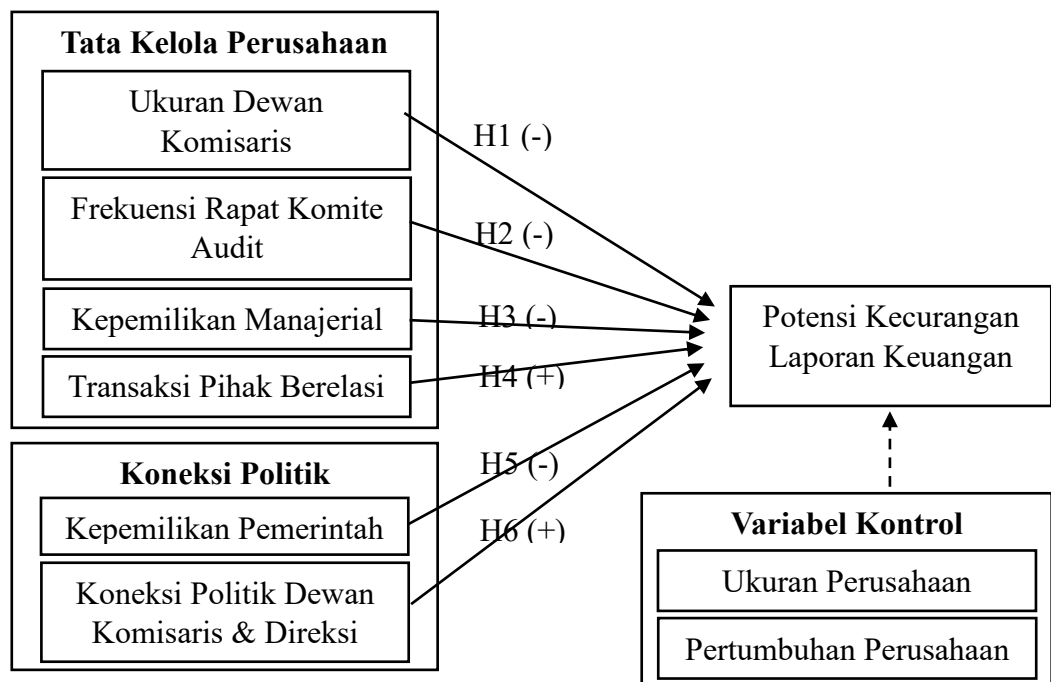
2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pengembangan hipotesis dan tinjauan pustaka di atas, kerangka konseptual penelitian ini disusun seperti pada Gambar 2.2. Penelitian ini akan mencoba menguji pengaruh variabel independen, yaitu tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap variabel dependen yaitu

kecurangan laporan keuangan. Variabel dependen tata kelola perusahaan dan koneksi politik masing-masing memiliki beberapa proksi. Tata kelola perusahaan diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak berelasi. Sedangkan koneksi politik diproksikan dengan kepemilikan pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dideskripsikan sebagai keberhasilan kondisi keuangan perusahaan, dimana perusahaan besar biasanya memiliki kompleksitas bisnis yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Pertumbuhan perusahaan dideskripsikan sebagai representasi dari berbagai strategi perusahaan untuk memberikan manfaat terbaik bagi pemegang saham.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif dengan data sekunder (*quantitative - secondary study*) karena menggunakan data numerik dalam pengujian statistik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyediakan atau mendeskripsikan situasi atau fenomena yang diukur dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hubungan sebab akibat (*cause and effect*) antara dua variabel yakni variabel dependen dan independen.

Desain penelitian ini akan bermanfaat untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Secara khusus, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik sebagai variabel independen terhadap kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Data kuantitatif yang digunakan sebagai instrumen penelitian merepresentasikan sudut pandang peneliti terhadap hubungan tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di industri ekstraktif yang dikategorikan dalam dua klasifikasi utama menurut IDX-IC (IDX Industrial Classification), yakni sektor energi (*energy*) dan barang baku (*basic materials*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2023. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan di sektor energi dan barang baku yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2018 – 2023.
2. Perusahaan di sektor energi dan barang baku yang menjalankan kegiatan usaha eksplorasi dan penambangan termasuk penyedia jasa penunjang, seperti jasa konsultasi, konstruksi, dan angkutan hasil pertambangan.
3. Perusahaan telah menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) periode 2018 – 2023 berturut-turut (*consistently*) dan memiliki data lengkap yang diperlukan untuk perhitungan variabel penelitian ini.

Secara khusus, penentuan periode laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada rekomendasi Kukreja *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa keakuratan hasil dari model Beneish akan lebih tinggi dengan periode studi lebih dari lima tahun. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan sampel laporan tahunan perusahaan periode 2018-2023.

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis dan metode pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1. Jenis Data

Tipe data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yakni Laporan Tahunan Perusahaan di industri ekstraktif Indonesia, yakni perusahaan yang termasuk dalam Sektor Energi dan Barang Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.3.2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi pada dokumen yang sudah ada, yakni laporan keuangan perusahaan. Peneliti mengakses laporan keuangan perusahaan tercatat (*listed company*) di *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan *website* resmi masing-masing perusahaan terkait. Data-data yang digunakan untuk penghitungan/pengukuran variabel penelitian kemudian disusun dalam Ms. Excel, untuk kemudian diolah menggunakan alat bantu analisis data yakni *software* Eviews.

3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel di dalam unsur tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Variabel yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan

variabel independen (X). Definisi operasional masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah potensi kecurangan laporan keuangan (Y). ACFE mendefinisikan kecurangan laporan keuangan perusahaan sebagai tindakan memanipulasi informasi yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan yang dirilis ke publik dan institusi keuangan. Pada penelitian ini, kecurangan laporan keuangan difokuskan pada tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan *Beneish M-Score model* sebagai pengukuran variabel potensi kecurangan laporan keuangan. *Beneish M-Score model* pertama kali dikemukakan oleh Beneish (1999). Model ini dirancang untuk menangkap distorsi laporan keuangan yang dapat diakibatkan oleh manipulasi atau prasyarat yang mungkin mendorong perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut (Beneish, 1999).

Beneish M-Score model merupakan sebuah model yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan delapan rasio, yakni DSRI (*Days Sales receivable Indeks*), GMI (*Gross Margin Index*), AQI (*Aset Quality Index*), SGI (*Sales Growth Index*), DEPI (*Depreciation Index*), SGAI (*Sales General*

Administrative Index), LVGI (*Leverage Index*), TATA (*Total Accrual to Total Assets*) (Hugo, 2019).

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Dependen (Model Beneish)

No.	Proksi	Pengukuran
1.	DSRI	$\frac{(\text{Piutang Usaha}_t : \text{Penjualan}_t)}{(\text{Piutang Usaha}_{t-1} : \text{Penjualan}_{t-1})}$
2.	GMI	$\frac{(\text{Laba kotor}_{t-1} : \text{Penjualan}_{t-1})}{(\text{Laba kotor}_t : \text{Penjualan}_t)}$
3.	AQI	$\frac{1 - \frac{\text{Aset lancar}_t + \text{Aset tetap}_t}{\text{Total aset}_t}}{1 - \frac{\text{Aset lancar}_{t-1} + \text{Aset tetap}_{t-1}}{\text{Total aset}_{t-1}}}$
4.	SGI	$\frac{\text{Penjualan}_t}{\text{Penjualan}_{t-1}}$
5.	DEPI	$\frac{\frac{\text{Depresiasi}_{t-1}}{\text{Aset tetap}_{t-1} + \text{Depresiasi}_{t-1}}}{\frac{\text{Depresiasi}_t}{\text{Aset Tetap}_t + \text{Depresiasi}_t}}$
6.	SGAI	$\frac{\frac{\text{Beban penjualan, umum, dan administrasi}_t}{\text{Penjualan}_t}}{\frac{\text{Beban penjualan, umum, dan administrasi}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}}}$
7.	LVGI	$\frac{\frac{\text{Total liabilitas}_t}{\text{Total aset}_t}}{\frac{\text{Total liabilitas}_{t-1}}{\text{Total aset}_{t-1}}}$
8.	TATA	$\frac{\text{Laba Tahun Berjalan}_t - \text{Arus Kas Aktivitas Operasi}_t}{\text{Total aset}_t}$

Nilai *Beneish M-Score* dapat dihitung dengan rumus di sebagai berikut:

$$M = -4,840 + 0,920\text{DSRI} + 0,528\text{GMI} + 0,404\text{AQI} + 0,892\text{SGI} + 0,115\text{DEPI} - 0,172\text{SGAI} + 4,679 \text{ TATA} - 0,327\text{LVGI}$$

Perusahaan dapat dikategorikan memiliki potensi kecurangan laporan keuangan jika M Score $> -2,22$ (nilai positif atau nilai negatif yang lebih kecil dari $-2,22$). Sedangkan, jika M Score $< -2,22$ (nilai negatif yang lebih tinggi dari $-2,22$) maka perusahaan dikategorikan tidak memiliki potensi kecurangan laporan keuangan. Lebih lanjut, perusahaan akan diberi skor 1 jika memiliki potensi kecurangan laporan keuangan, dan akan diberi skor 0 jika tidak memiliki potensi kecurangan laporan keuangan (Tarjo *et al.*, 2023).

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah tata kelola perusahaan dan koneksi politik. Variabel tata kelola perusahaan diproksikan dengan ukuran dewan komisaris (X_1), frekuensi rapat komite audit (X_2), kepemilikan manajerial (X_3), transaksi pihak berelasi (X_4). Kemudian variabel koneksi politik diproksikan dengan kepemilikan pemerintah (X_5) dan koneksi politik dewan komisaris dan/atau direksi (X_6). Definisi masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

A. Ukuran Dewan Komisaris (X_1)

Dewan komisaris merupakan salah satu organ khusus yang terdapat dalam struktur tata kelola perusahaan, yang berperan sebagai pengawas dalam suatu perusahaan (Suryarahman & Trihatmoko, 2021). Ukuran dewan komisaris yang dimaksud

adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan, di mana akan menunjukkan tingkat atau efektivitas pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan dalam mencegah adanya kecurangan laporan keuangan.

B. Frekuensi Rapat Komite Audit (X₂)

Komite audit menjalankan fungsi *monitoring* pada seluruh aktivitas perusahaan untuk memastikan perusahaan dijalankan secara akuntabel dan transparan demi kepentingan terbaik pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik memerlukan diskusi terbuka antara Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas (Monks & Minow, 2011). Sehingga, jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan untuk memantau, mengawasi, dan membahas informasi keuangan perusahaan dapat digunakan untuk mendeteksi maupun menindaklanjuti kecurangan. Secara khusus, rapat komite audit yang dikaji dalam penelitian ini adalah rapat yang terkait dua hal, yakni rapat rutin pengawasan internal dan rapat atas adanya indikasi kecurangan.

C. Kepemilikan Manajerial (X₃)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) merupakan keikutsertaan direksi dan/atau komisaris menjadi bagian dari pemilik saham perusahaan. Semakin besar keikutsertaan direksi memiliki saham, diharapkan direksi akan merasakan secara langsung

manfaat dari setiap keputusan yang dipilih, dan berusaha maksimal untuk kelangsungan aspek keuangan perusahaan, salah satunya mengurangi kecurangan laporan keuangan (Utomo *et al.*, 2019).

D. Transaksi Pihak Berelasi (X4)

Transaksi pihak berelasi merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan bisnis oleh pihak berelasi (*related party*) yang mempunyai hubungan istimewa dan memiliki tujuan tertentu, sehingga risiko salah saji material menjadi lebih tinggi daripada transaksi dengan pihak tidak berelasi (*unrelated party transaction*) (Yendrawati & Hernanda, 2022). Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor apabila entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain). Kondisi ini memunculkan risiko pengalihan atau pemindahan kekayaan (*tunneling*) dari pemegang saham yang disamarkan melalui transaksi pihak berelasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi (Habib *et al.*, 2017) dan menyembunyikan praktik memanipulasi laporan keuangan (Kabwe, 2023).

E. Kepemilikan Pemerintah (X5)

Hubungan politik perusahaan dapat diprosikan dengan sifat kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kepemilikan

pemerintah (Zhang, 2018). Kepemilikan pemerintah merupakan keikutsertaan pemerintah melalui badan usaha atau lembaga untuk memiliki saham suatu perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan maka kontrol atau kendali pemerintah atas suatu perusahaan semakin besar. Kondisi ini mengakibatkan buruknya kualitas pengawasan di perusahaan karena adanya hubungan khusus dengan pemerintah yang dapat menyembunyikan praktik kecurangan (Wicaksono & Suryandari, 2021).

F. Koneksi Politik Dewan Komisaris dan Direksi (X₆)

Perusahaan memiliki koneksi politik (*political connection*) apabila CEO atau direksi perusahaan sedang menjabat atau pernah menjabat di pemerintahan atau militer (Wu *et al.*, 2016). Hartanto (2023) mengemukakan bahwa perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika setidaknya salah satu dari dewan komisaris atau jajaran pimpinan perusahaan sebagai pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah dan/atau sebagai politisi dalam partai politik. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui kemudahan perusahaan memperoleh kontrak pemerintah (Brugués *et al.*, 2024), dan kecurangan laporan keuangan (Sudirman *et al.*, 2023).

Berdasarkan definisi variabel independen di atas, pengukuran masing-masing variabel independen disusun pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Pengukuran	Sumber
Ukuran dewan komisaris (BDSIZE)	Jumlah anggota dewan komisaris	(Wicaksono & Chariri, 2015)
Frekuensi rapat komite audit (ACMEET)	Jumlah seluruh rapat terkait pengawasan baik dengan pihak internal maupun eksternal, dan rapat atas adanya laporan atau indikasi kecurangan	(Astrawan & Achmad, 2023)
Kepemilikan manajerial (MNJOWN)	Persentase saham perusahaan yang ditahan atau dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi	(Girau <i>et al.</i> , 2022)
Transaksi pihak berelasi (RPT)	Penjualan kepada pihak berelasi dibagi dengan total penjualan	(Ratmono <i>et al.</i> , 2020)
Kepemilikan pemerintah (GOVOWN)	Persentase saham perusahaan yang dimiliki pemerintah	(Alkhataybeh <i>et al.</i> , 2022)

Variabel	Pengukuran	Sumber
Koneksi politik dewan komisaris dan/atau direksi (POLCON)	Variabel <i>dummy</i> , kode 1 apabila setidaknya salah satu dewan komisaris atau dewan direksi, atau pemegang saham mayoritas (setidaknya 10% dari saham dengan hak suara perusahaan) pernah atau sedang memegang (atau terafiliasi secara hubungan keluarga semenda) jabatan pemerintahan (eksekutif, legislatif, atau yudikatif), menteri, atau partai politik, dan kode 0 apabila sebaliknya.	(Faccio <i>et al.</i> , 2006)

3.4.3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Pertama, ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan level aktivitas perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar biasanya memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan mendeskripsikan rata-rata total penjualan bersih, total aset, dan perubahan modal pada tahun tertentu sampai beberapa tahun (Rojiyyah, 2019). Sehingga ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Kedua, pertumbuhan perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisinya (pertumbuhan pendapatan) dalam perekonomian. Pertumbuhan perusahaan dideskripsikan sebagai persentase perubahan pendapatan dari tahun ke tahun suatu perusahaan (Dewi & Anisykurlillah, 2021). Sehingga pertumbuhan perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Perusahaan} = \frac{\text{Total Revenue}_t - \text{Total Revenue}_{t-1}}{\text{Total Revenue}_{t-1}}$$

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data yang telah dikumpulkan sehingga mempermudah untuk menginterpretasikan data dan kemudian dapat dibuat kesimpulan. Data tersebut dapat diambil dengan melihat nilai *mean*, varian, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan skewness.

3.5.2. Pengujian *Hosmer and Lemshow's Goodness of Fit Test*

Hosmer and Lemshow's Goodness of Fit Test merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk menguji analisis regresi logistik. Pengujian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian data empiris dengan model penelitian yang diterapkan. Apabila nilai

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menunjukkan sama dengan atau kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sebaliknya, apabila nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menunjukkan lebih dari 0,05 maka model dapat dikatakan diterima karena sesuai dengan nilai observasinya (Harlan, 2018).

3.5.3. Pengujian Akurasi Tingkat Prediksi

Pengujian akurasi tingkat prediksi digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi dari model persamaan dan variabel yang digunakan dalam penelitian (Febriyani & Gunawan, 2022). Uji akurasi ini menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan yang salah (*incorrect*) pada tabel *Expectation-Prediction Evaluation*. Semakin tinggi nilai persentase benar (*% correct*) pada nilai total *estimated equation* maka dapat dikatakan bahwa akurasi tingkat prediksi model penelitian semakin baik.

3.5.4. Pengujian McFadden R^2

Pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) dapat menggunakan McFadden R-squared. Koefisien determinasi McFadden R-squared (McFadden, 1972) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan karena

kelebihan McFadden R^2 terletak pada penerapannya pada berbagai model regresi, termasuk model probit yang digunakan dalam penelitian ini (Liu *et al.*, 2023).

3.5.5. Pengujian Kelayakan Keseluruhan Regresi (*Overall Model Fit*)

Pengujian kelayakan keseluruhan regresi (*Overall Model Fit*) menggunakan uji statistik *likelihood ratio* (LR) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model regresi secara bersama-sama. Apabila nilai probabilitas (statistik LR) $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model yang dihipotesiskan sesuai dengan data yang ada atau fit (Subair *et al.*, 2020).

3.5.6. Analisis Regresi Logistik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian analisis regresi logistik karena variabel dependen yang digunakan yaitu variabel *dummy* yang memiliki dua kategori, misalnya terjadi dan tidak terjadi, dengan kode 1 jika terjadi dan kode 0 jika tidak terjadi (Sugiyono, 2016). Mekanisme *dummy* untuk sebagian besar regresi, konstanta harus dipilih untuk memaksa rata-rata koefisien yang ditransformasikan menjadi sama dengan 0. Untuk regresi logaritmik, konstanta harus dipilih untuk memaksa jumlah antilog koefisien menjadi sama dengan 1.

Persamaan model regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FSF} = & \alpha + \beta_1 \text{BCSIZE} + \beta_2 \text{ACMEET} + \beta_3 \text{MNJOWN} \\ & + \beta_4 \text{RPT} + \beta_5 \text{GOVOWN} + \beta_6 \text{POLCON} + \varepsilon \end{aligned}$$

Keterangan:

<i>FSF</i>	=	Kecurangan Laporan Keuangan
α	=	Konstanta
β_i	=	Koefisien regresi
<i>BDSIZE</i>	=	Ukuran dewan komisaris
<i>ACMEET</i>	=	Frekuensi rapat komite audit
<i>MNJOWN</i>	=	Kepemilikan manajerial
<i>RPT</i>	=	Transaksi pihak terkait
<i>GOVOWN</i>	=	Kepemilikan pemerintah
<i>POLCON</i>	=	Koneksi politik dewan komisaris dan direksi
ε	=	eror

3.5.7. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah diajukan didukung atau tidak didukung untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5% (Puspitaningtyas, 2016). Kriteria yang digunakan untuk uji f dan uji t adalah sebagai berikut:

- A. Ho didukung apabila nilai signifikansi $< 0,05$
- B. Ho tidak didukung apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Peneliti berfokus melakukan penelitian pada perusahaan di industri ekstraktif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh 34 sampel perusahaan dari total 78 perusahaan tercatat di industri ekstraktif. Dengan demikian, total data diperoleh 204 data (34 perusahaan x 6 tahun periode sampel penelitian). Kriteria sampel disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan di industri ekstraktif yang tercatat di BEI 2018-2023	78
2.	Perusahaan di industri ekstraktif yang tercatat di BEI setelah 2018	(28)
3.	Perusahaan di industri ekstraktif yang tidak mempublikasikan laporan tahunan 2018-2023 secara lengkap	(8)
4.	Perusahaan di industri ekstraktif yang tidak mengungkapkan informasi terkait variabel penelitian 2018-2023 secara lengkap	(8)
	Jumlah sampel perusahaan	34
	Jumlah sampel penelitian (x 6 tahun)	204

Sumber: Hasil olah data, 2024

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi dari suatu data. Analisis ini merujuk pada nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif yang terdiri dari ukuran dewan komisaris (BDSIZE), frekuensi rapat komite audit (ACMEET), kepemilikan manajerial (MNJOWN), transaksi pihak berelasi (RPT), kepemilikan pemerintah (GOVOWN) dan koneksi politik dewan komisaris dan/atau direksi (POLCON) disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Deskripsi Statistik

	Obs.	Mean	Min	Max	Std. Dev.
FSF	204	0.3676471	0.000000	1.000000	0.4833507
BCSIZE	204	4.343137	1.000000	11.00000	1.770002
ACMEET	204	10.38235	0.000000	77.00000	11.94820
MNJOWN	204	0.0405632	0.000000	0.685100	0.127690
RPT	204	0.1567956	0.000000	1.000000	0.263441
GOVOWN	204	0.0703412	0.000000	0.650000	0.186132
POLCON	204	0.2254902	0.000000	1.000000	0.418933
FSIZE	204	0.0215627	0.000100	0.168100	0.030542
FGROWTH	204	0.7005711	-0.86730	67.42920	4.949426

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 204 total sampel. Nilai *mean* variabel potensi kecurangan laporan keuangan (FSF) adalah 0,3676. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata potensi kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan dalam sampel adalah 37%, sedangkan

sisanya 63% tidak memiliki potensi kecurangan laporan keuangan. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 0,483 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai maksimum dan minimum FSF adalah 1 dan 0. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum adalah perusahaan yang memiliki potensi kecurangan laporan keuangan dan perusahaan yang memiliki nilai minimum adalah perusahaan yang tidak memiliki potensi kecurangan laporan keuangan.

2. Nilai *mean* variabel ukuran dewan komisaris (BCSIZE) adalah 4,343. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki 4 orang dewan komisaris. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 1,770 menunjukkan bahwa datanya agak tidak tersebar. Nilai standar yang lebih rendah dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai homogen. Nilai minimum ukuran dewan komisaris sebesar 1, sedangkan nilai maksimum ukuran dewan komisaris adalah 11.
3. Nilai *mean* variabel frekuensi rapat komite (ACMEET) audit adalah 10,382. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komite audit perusahaan menyelenggarakan sebanyak 10 kali. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 11,948 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai minimum frekuensi rapat

komite audit adalah 0, sedangkan nilai maksimum ukuran dewan komisaris adalah 77.

4. Nilai *mean* variabel kepemilikan manajerial (MNJOWN) adalah 0,0405. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 4,05% dari kepemilikan perusahaan adalah dimiliki oleh manajerial perusahaan. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 0,1276 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai minimum kepemilikan manajerial sebesar 0, sedangkan nilai maksimum kepemilikan manajerial sebesar 0,6851.
5. Nilai *mean* variabel transaksi pihak berelasi (RPT) adalah 0,1567. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 15,67% dari seluruh transaksi penjualan perusahaan adalah transaksi pihak berelasi. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 0,2634 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai minimum transaksi pihak berelasi sebesar 0, sedangkan nilai maksimum transaksi pihak berelasi sebesar 1.
6. Nilai *mean* variabel kepemilikan pemerintah (GOVOWN) adalah 0,0703. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 7,03% dari kepemilikan perusahaan adalah dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 0,1861316 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih

tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai minimum kepemilikan pemerintah sebesar 0, sedangkan nilai maksimum kepemilikan pemerintah sebesar 0,65.

7. Nilai *mean* variabel koneksi politik dewan komisaris dan direksi (POLCON) adalah 0,2254. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang memiliki dewan komisaris dan direksi terkoneksi politik adalah 23%, sedangkan sisanya 77% tidak terdapat dewan komisaris dan direksi yang terkoneksi politik. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 0,4189 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai maksimum dan minimum POLCON adalah 1 dan 0. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum adalah perusahaan yang memiliki dewan komisaris dan direksi terkoneksi politik dan perusahaan yang memiliki nilai minimum adalah perusahaan yang tidak memiliki dewan komisaris dan direksi terkoneksi politik.
8. Nilai *mean* variabel ukuran perusahaan (FSIZE) adalah 0,7006. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan perusahaan di industri ekstraktif 70,06%. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 4,9494 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 0,0001, sedangkan nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 0,1681.

9. Nilai *mean* variabel pertumbuhan perusahaan (FGROWTH) adalah 0,0215. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan di industri ekstraktif adalah 21,5 triliun rupiah. Selain itu, berdasarkan analisis, nilai standar deviasi sebesar 0,0305 menunjukkan bahwa datanya agak tersebar. Nilai standar yang lebih tinggi dari nilai *mean* berarti bahwa data dikategorikan sebagai heterogen. Nilai minimum ukuran perusahaan sebesar -0,8673, sedangkan nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 67,4292.

4.3. Pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Pengujian pertama adalah uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini digunakan untuk menguji kesesuaian data empiris dengan model penelitian yang diterapkan. Apabila hasil dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menunjukkan sama dengan atau kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sebaliknya, apabila hasil dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka model dapat dikatakan diterima karena sesuai dengan nilai observasinya. Hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

<i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.5371	8	0.5873

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menunjukkan nilai Prob. Chi-square sebesar 0,5873 atau lebih besar dari 0,05 ($0,5873 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dapat memprediksi (menjelaskan) nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data obeservasinya.

4.4. Pengujian Akurasi Tingkat Prediksi

Pengujian akurasi model digunakan untuk mengetahui seberapa baik data dari hasil prediksi model dan sebagai ukuran akurasi model. Uji akurasi model ini menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan yang salah (*incorrect*) pada tabel *Expectation-Prediction Evaluation*. Hasil pengujian akurasi model disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Akurasi Tingkat Prediksi

<i>Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification</i>	
% Correct	69.04
% Incorrect	30.96

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pengujian akurasi model menunjukkan nilai *correct* sebesar 69,04% dan nilai *incorrect* sebesar 30,96%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase ketepatan model dapat memprediksi dengan benar sebesar 69,04%.

4.5. Pengujian McFadden's R^2

Pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) dapat menggunakan McFadden R-squared. Koefisien determinasi McFadden R-squared digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian McFadden's R^2 disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji McFadden's R^2

<i>Logit Regression Results</i>	
McFadden R-squared	0.130754

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai McFadden's R^2 sebesar 0,1310754 yang berarti variasi variabel dependen (status potensi kecurangan laporan keuangan dan tidak ada potensi kecurangan laporan keuangan) mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian ini sebesar 13,11%, sedangkan sisanya 86,89% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.6. Pengujian Kelayakan Keseluruhan Regresi (*Overall Model Fit Test*)

Pengujian *Overall Model Fit* menggunakan uji statistik *likelihood ratio* (LR) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model regresi secara bersama-sama. Hasil pengujian kelayakan keseluruhan regresi disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Kelayakan Keseluruhan Regresi

<i>Logit Regression Results</i>	
Prob(LR statistic)	0.000026

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil pengujian kelayakan keseluruhan regresi menunjukkan nilai Prob (LR statistic) sebesar 0,000026 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,000026 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.7. Analisis Regresi Logistik

Analisis Regresi Logistik digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana variabel dependen yang digunakan merupakan variabel dummy. Hasil pengujian Regresi Logistik disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Logistik

<i>Logit Regression Results</i>			
Model	Coefficient	Std. Error	Prob.
C	-1.100010	0.466903	0.0185
BCSIZE	-0.030709	0.096312	0.7498
ACMEET	0.060271	0.024671	0.0146
MNJOWN	3.341755	1.332010	0.0121
RPT	1.317965	0.652162	0.0433
GOVOWN	-3.836911	1.658309	0.0207
POLCOM	-0.885980	0.444759	0.0464
FSIZE	-4.562516	5.913754	0.4404
FGROWTH	0.890106	0.332102	0.0074

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7, dari hasil pengujian regresi logistik dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FSF} = & -1,10 + (-0,0307) \text{BCSIZE} + (0,0603) \text{ACMEET} + (3,3417) \\ & \text{MNJOWN} + (1,3179) \text{RPT} + (-3,8369) \text{GOVOWN} + (-0,8859) \\ & \text{POLCON} + (-4,5625) \text{FSIZE} + (0,8901) \text{FGROWTH} + \varepsilon \end{aligned}$$

4.8. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah diajukan didukung atau tidak didukung berdasarkan hasil regresi logistik untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 4.7.

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada Tabel 4.7, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Nilai koefisien variabel ukuran dewan komisaris (BCSIZE) sebesar -0,0307 dengan nilai signifikansi 0,7498 (Prob.>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tidak didukung karena tidak ada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

b. Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Nilai koefisien variabel frekuensi rapat komite audit (ACMEET) sebesar 0,0603 dengan nilai signifikansi 0,0146 (Prob.<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak didukung karena frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

c. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Nilai koefisien variabel kepemilikan manajerial (MNJOWN) sebesar 1,3179 dengan nilai signifikansi 0,0121 (Prob.<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak didukung karena kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

d. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Nilai koefisien variabel transaksi pihak berelasi (RPT) sebesar 1,3179 dengan nilai signifikansi 0,0433 (Prob.<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat didukung karena transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

e. Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Nilai koefisien variabel kepemilikan pemerintah (GOVOWN) sebesar -3,8369 dengan nilai signifikansi 0,0207 (Prob.<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima didukung karena kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

f. Pengaruh koneksi politik dewan direksi dan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Nilai koefisien variabel koneksi politik dewan direksi dan komisaris (POLCON) sebesar -0,8859 dengan nilai signifikansi 0,0464 (Prob.<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam tidak didukung karena koneksi politik dewan direksi dan komisaris berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Sebagaimana hasil uji regresi logistik pada Tabel 4.7, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, transaksi pihak berelasi, kepemilikan pemerintah, dan koneksi politik dewan direksi dan komisaris berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh. Ringkasan hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Hasil
H1:	Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.	Tidak didukung
H2:	Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.	Tidak didukung
H3:	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.	Tidak didukung
H4:	Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.	Didukung
H5:	Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.	Didukung
H6:	Koneksi politik dewan direksi dan komisaris berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.	Tidak didukung

Berdasarkan Tabel 4.8, terdapat enam hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Dari hasil pengujian tersebut, dua dari enam hipotesis penelitian ini didukung, yaitu transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Sedangkan empat hipotesis lainnya tidak didukung.

4.9. Diskusi dan Pembahasan

5.3.1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Penelitian ini mengusulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung karena ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak atau semakin sedikitnya jumlah dewan komisaris suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan.

Ukuran dewan komisaris didefinisikan sebagai jumlah dewan komisaris yang melaksanakan tugas pengawasan dan penasihat terkait pengelolaan perusahaan untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Teori agensi mengemukakan bahwa peran

pengawasan oleh dewan komisaris sangat diperlukan untuk memastikan perusahaan dijalankan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik dan mencegah peningkatan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Pada kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan, dewan komisaris bersama dengan komite audit akan menjalankan peran pengawasan terhadap elemen-elemen dan proses pelaporan keuangan melalui bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan. Namun, hasil statistik pada penelitian ini menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, hasil ini kontradiktif dengan teori agensi dan hasil penelitian Kurnia *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Jumlah dewan komisaris yang lebih banyak tidak menjamin fungsi pengawasan berjalan dengan efektif dan tidak dapat mencegah kecurangan laporan keuangan. Perusahaan mungkin memiliki pandangan bahwa jumlah dewan komisaris yang terlalu besar justru akan meningkatkan biaya daripada manfaat yang diperolehnya melalui efektivitas pengawasan internal. Efektivitas peran pengawasan oleh dewan komisaris mungkin tidak direpresentasikan dari ukuran (jumlah) dewan komisaris, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan faktor lain seperti

independensi, dualitas, keahlian, dan pengalaman dewan komisaris dalam menjalankan peran pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhibad *et al.* (2021) yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

5.3.2. Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Penelitian ini mengusulkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis tidak didukung karena frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin sering komite audit melakukan rapat maka akan semakin tinggi potensi kecurangan laporan keuangan.

Komite audit merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertanggungjawab mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan potensi pelanggaran maupun tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Teori agensi mengemukakan bahwa kecurangan pelaporan keuangan dapat

disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga rapat komite audit diperlukan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, hasil ini kontradiktif dengan teori agensi dan hasil penelitian oleh Nurliasari & Achmad (2020) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Frekuensi rapat komite audit yang lebih banyak mungkin menghasilkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi karena komite audit dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan tugasnya. Namun, tingginya frekuensi rapat komite audit juga bisa diartikan sebagai sinyal tingginya risiko kecurangan laporan keuangan yang direspon oleh Komite Audit sehingga diperlukan rapat untuk menindaklanjutinya. Sebagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dalam Pasal 10 menyatakan bahwa Komite Audit bertugas melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, independensi dan keahlian komite audit mungkin perlu dipertimbangkan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan dibandingkan hanya dengan memperhatikan

banyaknya rapat yang dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh McLaughlin *et al.* (2021) yang menyimpulkan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan yang diindikasikan dengan tingginya skandal perusahaan.

5.3.3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Penelitian ini mengusulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis tidak didukung karena kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi potensi kecurangan laporan keuangan.

Dalam teori agensi, konflik keagenan berasal dari kecenderungan manajer untuk mengambil keuntungan tambahan dari sumber daya perusahaan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat menjadi insentif untuk mendorong manajer mencurahkan upaya terbaiknya bagi perusahaan dan membantu mengurangi motivasi manajer untuk meningkatkan kepentingan pribadi dan melakukan kecurangan.

Namun, sifat oportunistik agen mungkin mendorong mereka untuk memanfaatkan kewenangannya dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kepemilikan saham oleh manajerial turut berpotensi meningkatkan keinginan mereka untuk terus menambah kekayaan pribadi melalui kesempatan lebih besar mempengaruhi keputusan perusahaan termasuk mengarahkan tindakan kecurangan dan pada gilirannya merugikan kepentingan prinsipal lainnya. Dengan demikian, hasil ini kontradiktif dengan teori agensi dan hasil penelitian oleh Shan *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Manajerial yang turut memiliki saham perusahaan mungkin akan menempatkan mereka pada posisi dualitas (agen-prinsipal) dan menggeser tugas dan tanggung jawab manajerial yang semestinya, yaitu mengelola sumber daya perusahaan untuk kepentingan terbaik pemegang saham sedangkan mereka turut menjadi pemegang saham. Ini artinya, tujuan utama pemisahan agen dan prinsipal menjadi tidak tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abubakar *et al.* (2020) yang menyimpulkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap keinginan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan.

5.3.4. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Penelitian ini mengusulkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis didukung bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi transaksi pihak berelasi maka akan semakin tinggi potensi kecurangan laporan keuangan.

Transaksi pihak berelasi menimbulkan konflik kepentingan yang membahayakan tanggung jawab agensi kepada prinsipal. Transaksi antara perusahaan dan manajer, direktur, pemilik utama, atau afiliasinya sendiri dikenal sebagai transaksi pihak terkait. Transaksi pihak berelasi sering kali mengandung hak atau kondisi istimewa yang sering kali disalahgunakan, misalnya dijadikan cara untuk pengalihan atau pemindahan kekayaan (*tunneling*) dari pemegang saham untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, dan sarana memanipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi dan hasil penelitian Kabwe (2023) di mana perusahaan menggunakan transaksi pihak berelasi untuk memanipulasi laporan keuangan. Kecenderungan transaksi pihak berelasi yang dilakukan sebagai salah satu metode untuk

memanipulasi laporan keuangan pada gilirannya akan meningkatkan risiko konflik kepentingan sebagaimana teori agensi yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976).

5.3.5. Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Penelitian ini mengusulkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis tersebut didukung, yaitu kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan pemerintah maka akan semakin rendah potensi kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan pemerintah merupakan kondisi di mana pemerintah menjadi bagian dari pemilik saham suatu perusahaan, biasanya melalui badan usaha milik pemerintah. Berdasarkan teori akuntabilitas, akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur institusional yang membuat pemerintah memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan. Kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan dan menjaga manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi, mengelola dan melaporkan sumber daya

secara akuntabel dan transparan, serta mempertahankan citra perusahaan yang baik dengan mencegah tindakan kecurangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori akuntabilitas dan hasil penelitian Liang *et al.* (2023) di mana kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur institusional yang membuat pejabat administratif bertanggung jawab kepada warga negara memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan. Hubungan politik yang terbentuk antara kepentingan pemerintah dan sektor korporasi ini memungkinkan intervensi pemerintah untuk melakukan kontrol atau kendali atas suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap manajemen, termasuk bagaimana sumber daya perusahaan dikelola dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

5.3.6. Pengaruh koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Penelitian ini mengusulkan bahwa koneksi politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung karena koneksi politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap

potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris atau direksi yang terkoneksi politik maka perusahaan cenderung tidak memiliki potensi kecurangan laporan keuangan.

Pada kaitannya dengan potensi kecurangan laporan keuangan, teori akuntansi positif mengemukakan faktor biaya politik menjelaskan bahwa eksekutif perusahaan yang berada pada jabatan politik atau memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan antar berbagai kelompok. Mengingat pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia yakni oportunistik, mereka dapat memanfaatkan koneksi politiknya untuk keuntungan mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, hasil ini kontradiktif dengan faktor biaya politik dalam teori akuntansi positif dan hasil penelitian oleh Wang *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa koneksi politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Koneksi politik yang timbul melalui dewan komisaris dan direksi perusahaan mungkin justru membantu perusahaan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi tentang bagaimana perusahaan dikelola dan dilaporkan sesuai dengan regulasi. Selain itu, koneksi politik tersebut turut mendorong

perusahaan untuk mencegah tindakan tidak etis, termasuk kecurangan laporan keuangan, karena perhatian publik dan regulator akan lebih besar pada perusahaan yang terkoneksi politik karena adanya kewajiban lebih pada pengungkapan kekayaan oleh dewan komisaris dan direksi yang memiliki jabatan politik atau pihak berelasi yang memiliki jabatan politik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sehingga perubahan kekayaan signifikan oleh dewan komisaris dan direksi atau relatifnya akan sangat dihindari karena berisiko menempatkan mereka pada pemeriksaan oleh regulator, dan pada gilirannya akan menjadi perhatian publik yang mencemarkan nama baik perusahaan apabila ditemukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashafoke & Aderin (2023) yang menyimpulkan bahwa koneksi politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Peneliti menyadari bahwa perubahan kekayaan dewan komisaris dan direksi atau relatifnya yang terkoneksi politik dalam LHKPN hanya mengindikasikan risiko kecurangan yang melekat padanya. Kecurangan akan sulit diidentifikasi apabila dewan komisaris dan direksi atau relatifnya yang terkoneksi politik berperan sebagai mediator tindakan kecurangan yang tidak secara langsung mempengaruhi kekayaan mereka dalam LHKPN, atau

melibatkan kecurangan yang lebih kompleks. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor tersebut.

5.3.7. Variabel kontrol

Ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel kontrol penelitian ini. Pertama, pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi logistik ukuran perusahaan adalah -4,5625 dengan nilai signifikansi 0,4404. Pada level signifikan $\alpha = 5\%$, koefisien regresi logistik ini tidak signifikan karena nilai signifikan $0,4404 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Potensi kecurangan laporan tidak dapat diindikasikan dari ukuran perusahaan saja. Faktor lain perlu ditelaah, misalnya pertumbuhan perusahaan.

Kedua, pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi logistik pertumbuhan perusahaan adalah 0,8901 dengan nilai signifikansi 0,0074. Pada level signifikan $\alpha = 5\%$, koefisien regresi logistik ini signifikan karena nilai signifikan $0,0074 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia periode 2018 sampai 2023. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan

maka potensi kecurangan laporan keuangan juga meningkat. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan di industri ekstraktif akan mengejar keuntungan sebesar-besarnya, misalnya eksplorasi sumber daya alam selama masa hak pengelolaan yang dimiliki berlaku, biasanya disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan sepanjang periode tersebut perusahaan berpeluang lebih besar mengakui hasil eksplorasi tidak sesuai nilai dan waktu perolehan yang sebenarnya.

Perusahaan akan cenderung bersifat oportunistik selama periode hak pengelolaan sumber daya alam sebagaimana prinsip ekonomi klasik yakni bagaimana perusahaan mengeluarkan biaya serendah-rendahnya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka perusahaan akan cenderung mempertimbangkan dan menilai ulang biaya politik (biaya birokrasi) untuk memperoleh perpanjangan izin atau izin baru pertambangan dari pemerintahan agar tetap memperoleh manfaat dan keuntungan maksimal sehingga dapat menjaga atau meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Biaya yang mungkin dikeluarkan perusahaan untuk memperpanjang izin atau memperoleh izin baru pertambangan ke depan mungkin saja lebih besar atau bahkan tidak pasti akibat berbagai faktor, misalnya kemungkinan perubahan kebijakan industri ekstraktif, perubahan kebijakan pajak, hingga perubahan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan faktor biaya politik dalam teori akuntansi positif. Berdasarkan teori ini, ketika ancaman biaya politik

tinggi, hipotesis biaya politik memperkirakan bahwa perusahaan akan mengatur kemunculan laba yang lebih rendah melalui pilihan akuntansi, dan mendorong tindakan kecurangan laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN, BATASAN, KONTRIBUSI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tata kelola perusahaan dengan proksi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak berelasi, serta koneksi politik dengan proksi kepemilikan pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi dapat mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan industri ekstraktif di Indonesia. Terdapat dua variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Objek penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan industri ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018 – 2023. Berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dewan komisaris yang diukur melalui jumlah total dewan komisaris perusahaan, tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, hal ini membuktikan secara empiris bahwa semakin banyak atau semakin sedikit dewan komisaris suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan. Perusahaan mungkin memiliki pandangan bahwa jumlah dewan komisaris yang terlalu besar justru akan meningkatkan biaya

daripada manfaat yang diperolehnya melalui efektivitas pengawasan internal. Sehingga perusahaan mungkin memilih untuk mempertimbangkan aspek lain dalam menunjuk dewan komisaris, seperti independensi, dualitas, keahlian, dan pengalaman dewan komisaris dalam menjalankan peran pengawasan, dari pada hanya mempertimbangkan jumlahnya.

2. Frekuensi rapat komite audit yang diukur melalui jumlah total komite audit melakukan rapat terkait pengawasan internal dan pengelolaan potensi kecurangan dalam satu tahun, berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Semakin sering komite audit melakukan rapat maka semakin tinggi potensi kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya frekuensi rapat komite audit dapat diartikan sebagai sinyal tingginya risiko kecurangan laporan keuangan yang direspon oleh Komite Audit sehingga diperlukan rapat untuk menindaklanjutinya.
3. Kepemilikan manajerial yang diukur melalui persentase saham yang ditahan atau dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi, berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Semakin tinggi kepemilikan perusahaan akan meningkatkan potensi kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan saham oleh manajerial justru meningkatkan keinginan mereka untuk terus menambah kekayaan pribadi karena kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi keputusan

perusahaan termasuk mengarahkan tindakan kecurangan dan pada gilirannya merugikan kepentingan prinsipal lainnya

4. Transaksi pihak berelasi yang diukur melalui persentase penjualan kepada pihak berelasi dibandingkan dengan total penjualan dalam satu tahun, berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Semakin besar transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi maka semakin tinggi potensi kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki lebih besar transaksi dengan pihak berelasi cenderung memiliki peluang lebih besar melakukan kecurangan karena transaksi pihak berelasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memanipulasi laporan keuangan, misalnya dengan skema *tunneling* dan pada gilirannya akan meningkatkan risiko konflik kepentingan.
5. Kepemilikan pemerintah yang diukur melalui persentase saham perusahaan yang dimiliki pemerintah, berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan maka semakin rendah potensi kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan dan menjaga manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi, mengelola dan melaporkan sumber daya secara akuntabel dan transparan, serta mempertahankan citra perusahaan yang baik dengan mencegah tindakan kecurangan.

6. Koneksi politik dewan komisaris dan direksi yang diukur melalui ada atau tidaknya minimal satu orang dewan komisaris atau direksi yang terkoneksi politik, berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Semakin banyak dewan komisaris dan direksi yang terkoneksi politik maka semakin rendah potensi kecurangan laporan keuangan. Koneksi politik yang timbul melalui dewan komisaris dan direksi perusahaan mungkin justru membantu perusahaan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi tentang bagaimana perusahaan harus dikelola sesuai dengan regulasi, dan mencegah tindakan tidak etis, termasuk kecurangan laporan keuangan, karena perhatian publik dan regulator akan lebih besar pada perusahaan yang terkoneksi politik karena adanya kewajiban lebih pada pengungkapan harta oleh dewan komisaris dan direksi yang memiliki jabatan politik atau pihak berelasi (keluarga) yang memiliki jabatan politik melalui LHKPN.
7. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Perusahaan di industri ekstraktif akan cenderung bersifat oportunistik selama periode hak pengelolaan sumber daya alam sebagaimana prinsip ekonomi klasik yakni bagaimana perusahaan mengeluarkan biaya serendah-rendahnya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara agresif.

5.2. Batasan

Sebagaimana penelitian empiris lainnya, penelitian ini memiliki batasan dan saran untuk referensi penelitian di masa depan sebagai berikut:

1. Subjektifitas pengukuran potensi kecurangan tidak dapat dihindari, di mana penelitian ini menggunakan Model Beneish M-Score sebagai ukuran potensi kecurangan laporan keuangan.
2. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yang merepresentasikan tata kelola perusahaan dan koneksi politik, sehingga lebih banyak variabel yang belum diteliti dan mungkin memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan.
3. Sampel penelitian ini hanya fokus pada perusahaan industri ekstraktif Indonesia, sehingga belum merepresentasikan sampel perusahaan pada industri lainnya. Meskipun dapat dikatakan sebagai keterbatasan, di saat sama hal ini mungkin dapat merepresentasikan lebih spesifik terkait dampak dari tata kelola perusahaan dan koneksi politik di industri tersebut terhadap potensi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan di industri ekstraktif Indonesia saat ini.

5.3. Kontribusi dan Saran

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambah literatur pengembangan teori tentang faktor yang mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan bukti

empiris terkait pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan khususnya pada perusahaan industri ekstraktif di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memberikan sudut pandang baru terkait teori agensi dalam tata kelola perusahaan bahwa perlu pemisahan fungsi agen dan prinsipal mungkin tidak dapat menghilangkan potensi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga menambah literatur teori akuntabilitas dalam mengeksplorasi koneksi politik dalam perusahaan. Perusahaan memiliki kemampuan akses informasi untuk memenuhi regulasi yang lebih baik.

2. Penelitian ini memberikan informasi dan sudut pandang kritis kepada perusahaan bahwa pemisahan fungsi agen dan prinsipal tidak dapat menjamin hilangnya potensi kecurangan laporan keuangan. Selain itu, koneksi politik perusahaan dapat bermanfaat untuk memberikan kemudahan pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi sepanjang digunakan dan diawasi secara transparan demi tercapainya akuntabilitas pada perusahaan industri ekstraktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Akademik
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis lebih dalam terkait pengukuran potensi kecurangan laporan keuangan, misalnya menggunakan pengukuran yang berbeda yaitu Model

Dechow F-Score. Perbedaan pengukuran ini mungkin akan menunjukkan keputusan (*judgment*) yang berbeda dan memberikan perspektif baru terhadap hasil penelitian selanjutnya.

- b. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan pengaruh variabel independen dalam penelitian ini tidak hanya pada potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan, namun juga terhadap aspek sosial dan keadilan dalam bisnis. Misalnya, pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai pemegang saham dengan koneksi politik sebagai variabel mediasi. Selain itu, variabel nilai pemegang saham dapat menjadi variabel mediasi yang secara tidak langsung mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan oleh variabel independen dalam penelitian ini.
- c. Akademisi di bidang ilmu yang relevan dengan audit forensik yaitu audit sektor publik dapat mengembangkan penelitian selanjutnya melalui pengembangan variabel penelitian, misalnya variabel koneksi politik dapat diperiksa melalui koneksi politik pemegang saham mayoritas (non kepemilikan pemerintah) terhadap manajemen laba. Hal ini mungkin memberikan gambaran lebih baik tentang pengaruh koneksi politik terhadap kecurangan yang dalam hal ini adalah manajemen laba.
- d. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya pada satu industri saja, misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Praktik

- a. Perusahaan perlu mempertimbangkan koneksi politik yang dimilikinya untuk mempermudah akses informasi guna pembuatan kebijakan perusahaan yang memenuhi kepatuhan regulasi di industri terkait maupun sebagai perusahaan publik. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan pengawasan internal yang kuat dan terjaganya transparansi terhadap penggunaan koneksi politik perusahaan. Selain itu, meskipun hal ini wajar dalam proses bisnis perusahaan, perusahaan perlu mewaspadaikan risiko kecurangan yang lebih besar seiring dengan adanya transaksi pihak berelasi sebagaimana hasil dari penelitian ini.
- b. Pemerintah perlu menjaga jalur komunikasi perusahaan melalui koneksi politik tetap berada pada koridor untuk pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi perusahaan publik khususnya dalam pelaporan keuangan. Di saat yang sama, transparansi koneksi politik dengan perusahaan perlu ditingkatkan untuk memberikan informasi bagi pemegang saham publik dan masyarakat umum.
- c. Investor perlu mencermati perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola dan koneksi politik sebagaimana hasil penelitian ini untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi yang rasional, misalnya memilih perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk kepentingan terbaik pemegang saham secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababneh, T. A. M., & Aga, M. (2019). The impact of sustainable financial data governance, political connections, and creative accounting practices on organizational outcomes. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(20). <https://doi.org/10.3390/su11205676>
- Abubakar, H., Lawal, A. M., & Mohamed, M. I. (2020). Ownership Structure and Real Earnings Management : Evidence from Nigeria. *Journal of Management Theory and Practice*, *1*(3), 43–50. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2020.1.3.61>
- Admati, A. R. (2017). A skeptical view of financialized corporate governance. *Journal of Economic Perspectives*, *31*(3), 131–150. <https://doi.org/10.1257/jep.31.3.131>
- Ali, C. Ben. (2020). Agency Theory and Fraud. *Corporate Fraud Exposed*, 149–167. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-417-120201009>
- Alkhataybeh, A., AlSmadi, S. A., Shakhathreh, M. Z., & Khataybeh, M. A. (2022). Government Ownership and Corporate Cash Holdings: Empirical Evidence from the Amman Stock Exchange. *Sustainability*, *14*(18), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su141811168>
- Amara, I., & Khelif, H. (2020). A review of the influence of political connections on management's decision in non-US settings. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, *18*(4), 687–705. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0075>
- Apriyanto, D. (2016). The Influence Factors of Government Support, Political Conditions, and Business Competition On The Performance of Construction Services Company PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, *7*(2), 197–218. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.007.2.01>
- Ashafoke, T. O., & Aderin, A. (2023). Do Politically Connected Directors Affect Fraudulent Financial Reporting: Evidence from Nigeria Listed Firms. *Journal of Accounting & Management*, *13*(1), 89–103. <http://gala.gre.ac.uk/id/eprint/46872/>
- Astrawan, M. I., & Achmad, T. (2023). Pengaruh Efektivitas Auditor Spesialisasi industri, Fee Audit, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, *12*(2), 1–14. <https://repofeb.undip.ac.id/12405/>
- Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. *Financial Analysts Journal*, *55*(5), 24–36. <https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2296>
- Bertrand, M., Kramarz, F., Schoar, A., & Thesmar, D. (2018). The Cost of Political Connections. *Review of Finance*, *22*(3), 849–876.

<https://doi.org/10.1093/rof/rfy008>

- Boso, N., Danso, A., Leonidou, C., Uddin, M., Adeola, O., & Hultman, M. (2017). Does financial resource slack drive sustainability expenditure in developing economy small and medium-sized enterprises? *Journal of Business Research*, *80*(6), 247–256. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.016>
- Brogi, M., Gallucci, C., & Santulli, R. (2021). Does one size fit all? A configurational approach to board effectiveness in limiting the excess cash. *Management Decision*, *59*(13), 136–163. <https://doi.org/10.1108/MD-08-2020-0999>
- Brugués, F., Brugués, J., & Giambra, S. (2024). Political connections and misallocation of procurement contracts: Evidence from Ecuador. *Journal of Development Economics*, *170*(April), 1–34. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103296>
- Castrillón, M. A. G. (2021). The concept of corporate governance. *Visión de Futuro*, *25*(2), 178–194. <https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2021.25.02r.005.en>
- Cordis, A. (2023). Political alignment and corporate fraud: evidence from the United States of America. *Journal of Applied Accounting Research*, *25*(5), 1–8. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2022-0159>
- Craja, P., Kim, A., & Lessmann, S. (2020). Deep learning for detecting financial statement fraud. *Decision Support Systems*, *139*(10), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113421>
- Dandapani, K., & Shahrokhi, M. (2022). Guest editorial: Historical perspectives on corporate governance debate and introduction to the special issue on corporate governance and sustainability. *Managerial Finance*, *48*(8), 1117–1122. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2022-0237>
- Daresta, T., & Suryani Elly. (2022). Pengaruh Faktor-Faktor Kolusi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Journal of Management & Business*, *5*(2), 342–351. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.2893>
- Dewi, K., & Anisykurlillah, I. (2021). Analysis of the Effect of Fraud Pentagon Factors on Fraudulent Financial Statement with Audit Committee as Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, *10*(1), 39–46. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.44520>
- Dose, & Klimoski. (1995). Doing the Right Thing in the Workplace : Responsibility in the Face of Accountability. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, *8*(1), 35–56. <https://link.springer.com/article/10.1007/bf02621254>
- Ebaid, I. E.-S. (2023). Board characteristics and the likelihood of financial statements fraud: empirical evidence from an emerging market. *Future Business Journal*, *9*(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00218-z>

- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law & Economics*, 26(2), 301–325.
- Febriandani, M. S., & Utomo, D. C. (2022). Systematic literature review : penyebab kecurangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/36362>
- Febriyani, S., & Gunawan, J. (2022). Pengaruh New Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1217–1228. <https://doi.org/dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14910>
- Firdarini, K. C. (2023). Opini Audit sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh profitabilitas dan likuiditas pada perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 78–89. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.16>
- Fisman, R., & Wang, Y. (2010). The mortality cost of political connections. *Review of Economic Studies*, 82(4), 1346–1382. <https://doi.org/10.1093/restud/rdv020>
- Girau, E., Bujang, I., & Jidwin, A. (2022). Corporate governance challenges and opportunities in mitigating corporate fraud in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 620–638. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2021-0045>
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Haqq, A. P. N. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2020). Fraud Pentagon for Detecting Financial Statement Fraud. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 319–332. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1788>
- Harlan, J. (2018). *Analisis Regresi Logistik*. Penerbit Gunadarma.
- Hartanto, R. (2023). Pengaruh Political Connections dan Foreign Ownership terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2141–2149. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1555>
- Hashim, H. A., Salleh, Z., Shuhaimi, I., & Ismail, N. A. N. (2020). The risk of financial fraud: a management perspective. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1143–1159. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0062>
- Hassan, S. W. U., Kiran, S., Gul, S., Khatatbeh, I. N., & Zainab, B. (2023). The perception of accountants/auditors on the role of corporate governance and information technology in fraud detection and prevention. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2023-0235>

- Hidayat, E., & Utami, W. (2023). Determinants of Financial Statement Fraud: Political Connections as Moderation. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(1). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i01.1322>
- Hope, O., & Lu, H. R. (2019). Economic Consequences of Corporate Governance Disclosure: Evidence from the 2006 SEC Regulation on Related-Party Transactions. *The Accounting Review*, 95(4), 263–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr-52608>
- Hugo, J. (2019). Efektivitas Model Beneish M-Score Dan Model F-Score Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 165. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2296>
- Hussain, W., & Moriarty, J. (2018). Accountable to Whom ? Rethinking the Role of Corporations in Political CSR. *Journal of Bussiness Ethics*, 149(3), 519–534.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaab Omeir, A., Vasiliauskaite, D., & Soleimanizadeh, E. (2023). Detection of Financial Statements Fraud Using Beneish and Dechow Models. *Journal of Governance and Regulation*, 12(3), 334–344. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i3siart15>
- Kabwe, M. (2023). Fraudulent financial reporting and related party transactions. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(2), 217–228. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i2.2365>
- Kaituko, L. E., Githaiga, P. N., & Chelogoi, S. K. (2023). Board structure and the likelihood of financial statement fraud. Does audit fee matter? Evidence from manufacturing firms in the East Africa community. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218175>
- Kamarudin, K. A., Wan Ismail, W. A., & Kamaruzzaman, A. A. (2018). Board Members Diversity and Financial Statements Fraud: Malaysian Evidence. *State-of-the-Art Theories and Empirical Evidence*, 165–183. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6926-0_10
- Kukreja, G., Gupta, S. M., Sarea, A. M., & Kumaraswamy, S. (2020). Beneish M-score and Altman Z-score as a catalyst for corporate fraud detection. *Journal of Investment Compliance*, 21(4), 231–241. <https://doi.org/10.1108/joic-09-2020-0022>
- Kurnia, Z., Arum, E. D. P., & Wijaya Z., R. (2024). The influence of corporate governance on financial report fraud with company size as a moderating variable in infrastructure, utilities, and transportation companies listed on the Indonesian stock exchange during the period 2019-2021. *Cashflow Current*

Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide, 3(2), 276–290. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v3i2.962>

- Kusuma, H., & Fitriani, N. (2020). Ownership structure and the likelihood of financial reporting fraud. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 121–140.
- Kwarto, F., Nurafiah, N., Suharman, H., & Dahlan, M. (2024). The potential bias for sustainability reporting of global upstream oil and gas companies: a systematic literature review of the evidence. *Management Review Quarterly*, 74(1), 35–64. <https://doi.org/10.1007/s11301-022-00292-7>
- Labolo, M., Prihatini, J., & Zulaika, S. (2023). Corruption Loops in Indonesia During 2004-2019 (The Need for Protection Whistleblower). *International Journal of Applied Business and International Management*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v8i1.1721>
- Lemaître, S. (2019). Illicit financial flows within the extractive industries sector: a glance at how legal requirements can be manipulated and diverted. *Crime, Law and Social Change*, 71(1), 107–128. <https://doi.org/10.1007/s10611-018-9791-x>
- Liang, Q., Wang, Z., Guan, X., & Qin, W. (2023). Party direct control and corporate fraud: Evidence from China. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 92(10), 274–290. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.10.008>
- Liu, D., Zhu, X., Greenwell, B., & Lin, Z. (2023). A new goodness-of-fit measure for probit models: Surrogate R². *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 76(1), 192–210. <https://doi.org/10.1111/bmsp.12289>
- Maulidi, A., Shonhadji, N., Fachruzzaman, Sari, R. P., Nuswantara, D. A., & Widuri, R. (2023). Are female CFOs more ethical to the occurrences of financial reporting fraud? Theoretical and empirical evidence from cross-listed firms in the US. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1342–1366. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0170>
- McFadden, D. (1972). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. *Frontiers in Econometrics*. <https://escholarship.org/content/qt61s3q2xr/qt61s3q2xr.pdf>
- McLaughlin, C., Armstrong, S., Moustafa, M. W., & Elamer, A. A. (2021). Audit committee diversity and corporate scandals: evidence from the UK. *International Journal of Accounting and Information Management*, 29(5), 734–763. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-01-2021-0024>
- Mohamed, N., & Handley-Schachler, M. (2015). Roots of Responsibilities to Financial Statement Fraud Control. *Procedia Economics and Finance*, 28(4), 46–52. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01080-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01080-1)
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). Corporate Governance. In *Corporate and Business Strategy Review* (Vol. 2, Issue 2).

- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., & Anisykurlillah, I. (2021). Islamic corporate governance and financial statements fraud: A study of islamic banks. *Journal of Governance and Regulation*, 10(2), 361–368. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I2SIART16>
- Nasir, N. A. B. M., Ali, M. J., & Ahmed, K. (2019). Corporate governance, board ethnicity and financial statement fraud: evidence from Malaysia. *Accounting Research Journal*, 32(3), 514–531. <https://doi.org/10.1108/ARJ-02-2018-0024>
- Nurchayono, N., Hanum, A. N., Kristiana, I., & Pamungkas, I. D. (2021). Predicting fraudulent financial statement risk: The testing dechow f-score financial sector company in indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(6), 1487–1494. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090625>
- Nurliasari, K. E., & Achmad, T. (2020). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap kecurangan pelaporan keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(1), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27581>
- Onjewu, A. K. E., Walton, N., & Koliouis, I. (2023). Blockchain agency theory. *Technological Forecasting and Social Change*, 191(6), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122482>
- Pagano, M., & Immordino, G. (2012). Corporate fraud, governance, and auditing. *Review of Corporate Finance Studies*, 1(1), 109–133. <https://doi.org/10.1093/rcfs/cfs001>
- Pomegbe, W. W. K., Li, W., Dogbe, C. S. K., & Otoo, C. O. A. (2021). Closeness or opportunistic behavior? Mediating the business ecosystem governance mechanisms and coordination relationship. *Cross Cultural and Strategic Management*, 28(3), 530–552. <https://doi.org/10.1108/CCSM-01-2020-0013>
- Preuss, S., & Königsgruber, R. (2021). How do corporate political connections influence financial reporting? A synthesis of the literature. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106802. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106802>
- Probohudono, A. N., Lubis, A. T., Nahartyo, E., & Arifah, S. (2022). Governance structure and the tendency to do financial statements fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art6>
- Purwiyanti, D., & Laksito, H. (2022). The Effect of Audit Committee Effectiveness and Potential Fraudulent Financial Statements. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 7(1), 86–97. <https://doi.org/10.32486/aksi.v7i1.273>
- Puspitaningtyas. (2016). Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kuantitatif. In *Google Books* (Issue 2016). Deepublish.
- Ratmono, D., Darsono, D., & Cahyonowati, N. (2020). Financial Statement Fraud

- Detection With Beneish M-Score and Dechow F-Score Model: An Empirical Analysis of Fraud Pentagon Theory in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 11(6), 154. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p154>
- Rimšaitė, L. (2019). Corruption risk mitigation in energy sector: Issues and challenges. *Energy Policy*, 125(December 2017), 260–266. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.10.066>
- Rojiyyah, Q. A. (2019). *The Influence Of Financial Performance And Corporate Governance On Corporate Risk*.
- Rostami, V., & Rezaei, L. (2022). Corporate governance and fraudulent financial reporting. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 1009–1026. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0160>
- Ruhnka, J. C., & Boerstler, H. (1998). Governmental incentives for corporate self-regulation. *Journal of Business Ethics*, 17(3), 309–326. <https://doi.org/10.1023/A:1005757628513>
- Shan, Y. G., Troshani, I., Wang, J., & Zhang, L. (2024). Managerial ownership and financial distress: evidence from the Chinese stock market. *International Journal of Managerial Finance*, 20(1), 192–221. <https://doi.org/10.1108/IJMF-06-2022-0270>
- Subair, M. L., Salman, R. T., Abolarin, A. F., Abdullahi, A. T., & Othman, A. S. (2020). Board Characteristics and the Likelihood of Financial Statement Fraud. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.12775/cjfa.2020.003>
- Sudirman, I., Hasan, H., Kartini, Syamsuddin, & Nirwana. (2023). The Fraud Gone Model and Political Connection – Distribution Approach. *Journal of Distribution Science*, 21(12), 71–81. <https://doi.org/10.15722/jds.21.12.202312.71>
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Suryarahman, E., & Trihatmoko, H. (2021). Effect of Environmental Performance and Board of Commissioners on Environmental Disclosures. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.5984>
- Tarjo, T., Prasetyono, P., Sakti, E., Pujiono, Mat-Isa, Y., & Safkaur, O. (2023). Predicting Fraudulent Financial Statement Using Cash Flow Shenanigans. *Business: Theory and Practice*, 24(1), 33–46. <https://doi.org/10.3846/btp.2023.15283>
- Tsegba, I. N., & Upaa, J. U. (2015). Consequences of Financial Statement Fraud: A Developing Country Perspective. *International Journal of Business and Management*, 10(8), 115–126. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n8p115>
- Utomo, S. D., Machmuddah, Z., & Pamungkas, I. D. (2019). The effect of auditor

- switching and managerial ownership on fraudulent financial statement. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 16, 306–315. https://repository.dinus.ac.id/docs/jabfung/1154/10._Auditor_Switching.pdf
- Wang, Y., Ashton, J. K., & Liu, J. (2024). Does the form of state ownership and political connections influence the incidence of financial statement fraud? *European Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2024.2363421>
- Wardhani, D. K., & Suprati, W. (2023). Characteristics of a good board of directors for Indonesian SOEs performance. *Journal of Indonesia Economy and Business*, 38(1), 1–18. <https://doi.org/10.2307/j.ctv138wr4c.9>
- Wati, L. N., Primiana, H. I., Pirzada, K., & Sudarsono, R. (2019). Political connection, blockholder ownership and performance. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 52–68. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(5\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(5))
- Watts, R. L., Zimmerman, J. L., & Ross Watts, S. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards towards a positive theory of the determination of accounting. *The Accounting Review*, 53(I), 112–134. <http://www.jstor.org/stable/245729%0Ahttp://about.jstor.org/terms>
- Werner, T. (2016). The Business of America Is Lobbying: How Corporations Became Politicized and Politics Became More Corporate. *Political Science Quarterly Oxford University Press*, 131(1). <https://doi.org/10.1002/polq.12441>
- Wicaksono, A., & Suryandari, D. (2021). The Analysis of Fraudulent Financial Reports Through Fraud Hexagon on Public Mining Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 220–228. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i3.54999>
- Wicaksono, G. S., & Chariri, A. (2015). Mekanisme corporate governance dan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 1–12. <https://doi.org/http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wu, W., Johan, S. A., & Rui, O. M. (2016). Institutional Investors, Political Connections, and the Incidence of Regulatory Enforcement Against Corporate Fraud. *Journal of Business Ethics*, 134(4), 709–726. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2392-4>
- Yendrawati, R., & Hernanda, S. A. (2022). Fraud Hexagon : Pendeteksian Potensi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score Model. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(5), 73–84. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2778>
- Zhang, J. (2018). Public Governance and Corporate Fraud: Evidence from the Recent Anti-corruption Campaign in China. *Journal of Business Ethics*, 148(2), 375–396. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3025-x>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Sampel Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Tanggal Tercatat
1	ABM Investama Tbk.	ABMM	06/12/2011
2	Adaro Energy Indonesia Tbk.	ADRO	16/07/2008
3	AKR Corporindo Tbk.	AKRA	03/10/1994
4	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.	BBRM	09/01/2013
5	Baramulti Suksessarana Tbk.	BSSR	08/11/2012
6	Bumi Resources Tbk.	BUMI	30/07/1990
7	Bayan Resources Tbk.	BYAN	12/08/2008
8	Darma Henwa Tbk	DEWA	26/09/2007
9	Delta Dunia Makmur Tbk.	DOID	15/06/2001
10	Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA	10/12/2009
11	Elnusa Tbk.	ELSA	06/02/2008
12	Energi Mega Persada Tbk.	ENRG	07/06/2004
13	Alfa Energi Investama Tbk.	FIRE	09/06/2017
14	Golden Energy Mines Tbk.	GEMS	17/11/2011
15	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	HITS	15/12/1997
16	Harum Energy Tbk.	HRUM	06/10/2010
17	Indika Energy Tbk.	INDY	11/06/2008
18	Indo Tambangraya Megah Tbk.	ITMG	18/12/2007
19	Resource Alam Indonesia Tbk.	KKGI	01/07/1991
20	Mitra Energi Persada Tbk.	KOPI	04/05/2015
21	Mitrabara Adiperdana Tbk.	MBAP	10/07/2014
22	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.	MBSS	06/04/2011
23	Medco Energi Internasional Tbk.	MEDC	12/10/1994
24	Samindo Resources Tbk.	MYOH	27/07/2000
25	Perusahaan Gas Negara Tbk.	PGAS	15/12/2003
26	IMC Pelita Logistik Tbk.	PSSI	05/12/2017
27	Indo Straits Tbk.	PTIS	12/07/2011
28	Rukun Raharja Tbk.	RAJA	19/04/2006
29	Radiant Utama Interinsco Tbk.	RUIS	12/07/2006
30	Soechi Lines Tbk.	SOCI	03/12/2014
31	Dana Brata Luhur Tbk.	TEBE	18/11/2019
32	Aneka Tambang Tbk.	ANTM	27/11/1997
33	Central Omega Resources Tbk.	DKFT	21/11/1997
34	Timah Tbk.	TINS	19/10/1995

Lampiran 2

Data Jumlah Dewan Komisaris Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Jumlah Dewan Komisaris					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	3	3	3	4	4	4
2	ADRO	4	5	5	5	5	6
3	AKRA	3	3	3	3	3	3
4	BBRM	3	3	3	3	3	3
5	BSSR	9	10	9	11	8	8
6	BUMI	9	8	7	8	8	8
7	BYAN	6	4	4	4	4	6
8	DEWA	4	4	6	6	6	6
9	DOID	6	7	7	5	4	4
10	DSSA	4	5	5	5	5	5
11	ELSA	5	5	4	4	4	4
12	ENRG	5	5	5	5	5	6
13	FIRE	2	2	2	2	2	3
14	GEMS	6	6	5	6	6	6
15	HITS	2	2	2	2	2	2
16	HRUM	6	6	6	5	5	5
17	INDY	5	5	5	5	5	5
18	ITMG	5	6	7	7	8	8
19	KKGI	5	6	5	5	5	5
20	KOPI	3	3	2	2	2	2
21	MBAP	3	3	3	3	2	2
22	MBSS	5	5	5	5	3	3
23	MEDC	5	5	4	4	4	3
24	MYOH	3	3	3	3	3	3
25	PGAS	6	6	6	6	6	6
26	PSSI	3	4	4	5	3	3
27	PTIS	2	2	2	2	2	2
28	RAJA	4	5	4	4	3	5
29	RUIS	3	3	3	3	3	3
30	SOCI	3	3	3	2	2	2
31	TEBE	1	3	3	3	3	3
32	ANTM	5	6	6	5	5	5
33	DKFT	3	3	3	3	3	3
34	TINS	6	5	5	6	7	5

Lampiran 3

Data Frekuensi Rapat Komite Audit Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Frekuensi Rapat Komite Audit					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	12	13	16	20	60	20
2	ADRO	12	7	10	8	8	11
3	AKRA	6	8	10	8	8	10
4	BBRM	4	5	5	5	6	6
5	BSSR	4	4	4	4	7	8
6	BUMI	9	9	8	10	10	11
7	BYAN	6	6	7	7	7	8
8	DEWA	5	12	14	11	16	8
9	DOID	4	4	4	3	5	8
10	DSSA	8	6	7	6	8	7
11	ELSA	12	9	16	14	24	23
12	ENRG	4	4	4	4	4	4
13	FIRE	4	4	3	3	2	1
14	GEMS	5	4	4	4	5	5
15	HITS	12	8	8	15	9	35
16	HRUM	4	8	5	3	4	3
17	INDY	10	9	7	6	6	6
18	ITMG	6	6	8	12	15	15
19	KKGI	5	5	4	5	5	8
20	KOPI	5	4	4	4	4	4
21	MBAP	10	6	12	7	10	9
22	MBSS	5	7	4	4	4	4
23	MEDC	7	5	5	3	4	2
24	MYOH	3	5	5	8	8	8
25	PGAS	31	39	57	51	52	46
26	PSSI	16	14	16	16	10	8
27	PTIS	5	6	6	6	6	4
28	RAJA	4	4	4	4	4	4
29	RUIS	4	4	4	4	4	4
30	SOCI	7	7	6	5	6	5
31	TEBE	0	0	4	4	4	4
32	ANTM	28	24	26	28	40	33
33	DKFT	12	12	11	6	6	10
34	TINS	18	77	19	35	62	60

Lampiran 4

Data Kepemilikan Manajerial Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Kepemilikan Manajerial					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	0.0027	0.0027	0.0060	0.0027	0.0027	0.0027
2	ADRO	0.1240	0.1240	0.1234	0.1238	0.1237	0.1234
3	AKRA	0.0068	0.0068	0.0066	0.0116	0.0145	0.0174
4	BBRM	0.0059	0.0079	0.0034	0.0034	0.0034	0.0014
5	BSSR	0.0050	0.0030	0.0020	0.0020	0.0000	0.0000
6	BUMI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	BYAN	0.6630	0.6569	0.6586	0.6744	0.6738	0.6851
8	DEWA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	DOID	0.0032	0.0042	0.0041	0.0026	0.0041	0.0026
10	DSSA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	ELSA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	ENRG	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	FIRE	0.4095	0.3601	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
14	GEMS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	HITS	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	HRUM	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
17	INDY	0.0186	0.0194	0.0028	0.0028	0.0026	0.0027
18	ITMG	0.0009	0.0009	0.0012	0.0012	0.0012	0.0013
19	KKGI	0.0037	0.0037	0.0021	0.0021	0.0046	0.0045
20	KOPI	0.0376	0.0376	0.0146	0.0146	0.0146	0.0146
21	MBAP	0.0072	0.0072	0.0028	0.0028	0.0029	0.0029
22	MBSS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0049	0.0001	0.0001
23	MEDC	0.0131	0.0140	0.0067	0.0068	0.0065	0.0132
24	MYOH	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	PGAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	PSSI	0.0000	0.0010	0.0028	0.0063	0.0063	0.0035
27	PTIS	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
28	RAJA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	RUIS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	SOCI	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
31	TEBE	0.0783	0.0783	0.0609	0.0360	0.0347	0.0347
32	ANTM	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
33	DKFT	0.0535	0.0534	0.0050	0.0278	0.0278	0.0276
34	TINS	0.1170	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lampiran 5

Data Transaksi Pihak Berelasi Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Transaksi Pihak Berelasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	0.0938	0.1588	0.1807	0.2501	0.2159	0.3244
2	ADRO	0.0012	0.0039	0.0110	0.0128	0.0139	0.4476
3	AKRA	0.0114	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
4	BBRM	0.0000	0.0000	0.0380	0.0524	0.0362	0.0425
5	BSSR	0.2104	0.0878	0.0430	0.1074	0.1013	0.0933
6	BUMI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	BYAN	0.0014	0.0373	0.0474	0.0601	0.0638	0.0507
8	DEWA	0.8875	0.9498	0.9969	0.9987	0.9888	0.9895
9	DOID	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0045	0.0012
10	DSSA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	ELSA	0.6731	0.7378	0.7855	0.7606	0.7026	0.7697
12	ENRG	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	FIRE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	GEMS	0.2160	0.1277	0.1596	0.1311	0.0697	0.0827
15	HITS	0.1545	0.1423	0.1301	0.1767	0.2018	0.2059
16	HRUM	0.0430	0.0540	0.0740	0.0370	0.0130	0.0104
17	INDY	0.0516	0.0506	0.0672	0.0366	0.0202	0.0488
18	ITMG	0.0343	0.0657	0.0463	0.0261	0.0289	0.0472
19	KKGI	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
20	KOPI	0.0198	0.0391	0.0212	0.0000	0.0228	0.0232
21	MBAP	0.2508	0.1541	0.1340	0.2542	0.4605	0.3261
22	MBSS	0.2700	0.2800	0.4100	0.4000	0.2100	0.7200
23	MEDC	0.0000	0.0006	0.0028	0.0022	0.0011	0.0002
24	MYOH	0.9261	0.9398	1.0000	1.0000	1.0000	0.9744
25	PGAS	0.3226	0.3758	0.4238	0.3787	0.3769	0.3422
26	PSSI	0.0175	0.0420	0.0837	0.0412	0.0092	0.0000
27	PTIS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0235	0.2095	0.3096
28	RAJA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	RUIS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	SOCI	0.0112	0.0364	0.0175	0.0026	0.0034	0.0001
31	TEBE	0.4120	0.3097	0.2553	0.1987	0.1736	0.1779
32	ANTM	0.0372	0.0272	0.0547	0.1279	0.2635	0.1846
33	DKFT	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	TINS	0.0000	0.0000	0.0777	0.4813	0.3715	0.3647

Lampiran 6

Data Kepemilikan Pemerintah Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Kepemilikan Pemerintah					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	ADRO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	AKRA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	BBRM	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	BSSR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	BUMI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	BYAN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	DEWA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	DOID	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	DSSA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	ELSA	0.4110	0.4110	0.4110	0.5110	0.5110	0.5110
12	ENRG	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	FIRE	0.1818	0.1558	0.1557	0.1557	0.1557	0.1557
14	GEMS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	HITS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	HRUM	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	INDY	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	ITMG	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	KKGI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	KOPI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	MBAP	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	MBSS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	MEDC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	MYOH	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	PGAS	0.5697	0.5697	0.5697	0.5697	0.5697	0.5697
26	PSSI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	PTIS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	RAJA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	RUIS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	SOCI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	TEBE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	ANTM	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500
33	DKFT	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	TINS	0.0550	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500

Lampiran 7

Data Koneksi Politik Dewan Komisaris & Direksi Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Kepemilikan Pemerintah					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	0	0	0	0	0	0
2	ADRO	0	1	1	1	1	1
3	AKRA	0	0	0	0	0	1
4	BBRM	1	1	0	0	0	0
5	BSSR	0	0	0	0	0	0
6	BUMI	0	0	0	0	0	0
7	BYAN	1	1	1	1	1	1
8	DEWA	1	1	0	0	0	0
9	DOID	1	1	1	1	1	1
10	DSSA	0	0	0	0	0	0
11	ELSA	1	1	1	1	1	1
12	ENRG	0	0	0	0	0	0
13	FIRE	0	0	0	0	0	0
14	GEMS	0	0	0	0	0	0
15	HITS	0	0	0	0	0	0
16	HRUM	1	1	0	0	0	0
17	INDY	0	0	0	0	0	0
18	ITMG	0	0	0	0	0	0
19	KKGI	0	0	0	0	0	0
20	KOPI	0	0	0	0	0	0
21	MBAP	0	0	0	0	1	1
22	MBSS	0	0	0	0	0	0
23	MEDC	0	0	0	0	0	0
24	MYOH	0	0	0	0	0	0
25	PGAS	0	0	0	0	0	0
26	PSSI	1	1	1	0	0	0
27	PTIS	1	1	1	1	1	0
28	RAJA	0	0	0	0	0	0
29	RUIS	0	0	0	0	0	0
30	SOCI	0	0	0	0	0	0
31	TEBE	0	0	0	0	0	0
32	ANTM	0	0	0	0	0	1
33	DKFT	0	0	0	0	0	0
34	TINS	0	0	1	1	1	1

Lampiran 8

Data Potensi Kecurangan Laporan Keuangan Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Kepemilikan Pemerintah					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	0	0	0	0	1	1
2	ADRO	0	0	0	0	0	1
3	AKRA	1	0	0	1	1	0
4	BBRM	1	0	0	1	0	0
5	BSSR	0	0	0	0	0	1
6	BUMI	1	1	0	1	0	1
7	BYAN	0	1	1	0	1	1
8	DEWA	1	1	0	0	1	1
9	DOID	0	0	0	0	0	0
10	DSSA	1	0	0	0	1	0
11	ELSA	0	0	0	0	0	0
12	ENRG	0	0	0	0	0	0
13	FIRE	1	0	1	0	0	1
14	GEMS	1	0	1	0	1	1
15	HITS	0	1	0	1	0	1
16	HRUM	1	0	0	1	1	1
17	INDY	1	0	0	0	0	1
18	ITMG	0	0	0	0	1	1
19	KKGI	0	1	0	0	1	1
20	KOPI	0	1	0	0	0	0
21	MBAP	1	0	0	1	0	1
22	MBSS	0	1	1	0	1	1
23	MEDC	1	0	0	0	1	0
24	MYOH	0	1	0	0	1	1
25	PGAS	0	0	1	0	0	0
26	PSSI	0	0	0	0	0	1
27	PTIS	0	0	0	0	1	1
28	RAJA	0	0	0	0	1	0
29	RUIS	1	1	0	0	0	0
30	SOCI	1	0	0	0	0	0
31	TEBE	1	1	0	0	1	0
32	ANTM	1	0	0	0	1	0
33	DKFT	1	0	0	0	1	0
34	TINS	1	1	0	0	0	1

Lampiran 8

Data Ukuran Perusahaan Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Ukuran Perusahaan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	30.1054	30.0879	30.3252	31.0622	31.1365	27.6610
2	ADRO	32.2394	32.1310	32.3156	32.7557	30.8958	28.5425
3	AKRA	30.6948	30.5587	30.7884	30.9338	31.0407	27.3494
4	BBRM	27.7055	26.9865	27.3198	26.9966	27.0094	23.7965
5	BSSR	28.8794	28.9433	29.4575	29.4735	29.4725	27.3854
6	BUMI	31.5472	31.5097	31.7299	31.8792	31.8036	26.9785
7	BYAN	30.5083	30.7598	31.1786	31.7503	31.6046	27.9938
8	DEWA	29.6643	29.6809	29.7156	29.7091	29.7275	25.7535
9	DOID	30.4301	30.2517	30.7814	30.8295	30.9963	27.3084
10	DSSA	31.5764	31.3423	31.3911	32.2491	31.4877	28.7294
11	ELSA	29.5487	29.6543	29.6099	29.8099	29.8929	26.1784
12	ENRG	29.8764	30.1087	30.3513	30.5554	30.6818	25.6227
13	FIRE	27.0208	26.9484	26.9263	26.6213	26.7607	23.4961
14	GEMS	30.0153	30.0714	30.1017	30.4992	30.6395	28.3015
15	HITS	28.6726	28.7769	28.7912	28.9078	29.0653	25.7313
16	HRUM	29.4578	29.5818	30.1553	30.6237	30.8584	27.0135
17	INDY	31.5484	31.5285	31.5952	31.6570	31.5035	27.8158
18	ITMG	30.4528	30.4248	30.7997	31.3486	31.1508	28.0948
19	KKGI	28.1943	28.0583	28.2656	28.6069	28.7612	25.3234
20	KOPI	25.7258	25.9458	25.6590	26.2746	26.5675	24.6228
21	MBAP	28.6155	28.5737	28.9333	29.1954	28.8961	26.9419
22	MBSS	28.7403	28.6421	28.5612	28.8219	28.9698	25.5011
23	MEDC	32.0543	32.0496	32.0268	32.3139	32.3786	28.4561
24	MYOH	28.4315	28.3878	28.4811	28.6028	28.9270	25.5728
25	PGAS	32.2609	32.2970	32.3055	32.3511	32.2549	29.8829
26	PSSI	28.3195	28.3591	28.4643	28.6594	28.7777	24.6727
27	PTIS	26.9419	26.9348	26.9884	27.2006	27.0911	24.5223
28	RAJA	28.5506	28.4857	28.8851	29.0326	29.2552	26.4469
29	RUIS	27.8553	27.9275	27.8909	27.8681	27.9250	25.4818
30	SOCI	29.8893	29.8614	29.8259	29.9220	29.8642	25.8054
31	TEBE	27.5245	27.4495	27.6200	27.8953	27.7716	22.1745
32	ANTM	31.0387	31.0883	31.1250	31.1467	31.3888	27.6734
33	DKFT	28.6076	28.5729	28.4393	28.4973	28.5740	25.2504
34	TINS	30.1054	30.0879	30.3252	31.0622	31.1365	27.6610

Lampiran 9

Data Pertumbuhan Perusahaan Periode 2018 - 2023

No.	Kode Saham	Ukuran Perusahaan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABMM	0.1963	-0.2644	0.0387	0.7048	0.5456	0.0227
2	ADRO	0.1874	-0.0832	-0.2560	0.5936	1.2173	-0.8673
3	AKRA	0.2876	-0.0784	-0.1837	0.4511	0.8493	-0.1147
4	BBRM	-0.0615	-0.1987	-0.3336	-0.3268	0.3500	0.1191
5	BSSR	0.2073	-0.0949	-0.1956	1.1102	0.6263	0.0915
6	BUMI	67.4292	-0.0394	-0.2791	0.2904	0.9833	-0.0910
7	BYAN	0.6791	-0.2033	0.0172	1.0684	0.8019	-0.2461
8	DEWA	0.2155	0.1983	-0.1074	0.0769	0.3773	16.9446
9	DOID	0.2476	-0.0515	-0.3077	0.5310	0.8644	0.1684
10	DSSA	0.4304	-0.0956	-0.0822	0.4531	2.0060	-0.1663
11	ELSA	0.3305	0.2657	-0.0785	0.0530	0.5124	0.0210
12	ENRG	-0.0779	0.1737	-0.0140	0.2646	0.2160	-0.0781
13	FIRE	3.4287	0.5591	-0.1250	-0.2131	-0.7026	0.0567
14	GEMS	0.4708	0.0173	-0.0275	0.5117	1.0117	-0.0160
15	HITS	0.2915	0.0122	0.0617	-0.0474	0.4430	-0.0078
16	HRUM	0.1053	-0.2514	-0.3902	1.1551	1.9396	0.0133
17	INDY	1.8823	-0.0984	-0.3386	0.7119	0.5433	-0.3086
18	ITMG	0.2701	-0.1797	-0.2989	0.7726	0.9131	-0.3534
19	KKGI	-0.2734	0.9362	-0.3619	0.8512	1.1104	0.1432
20	KOPI	-0.5721	1.2597	0.0544	-0.0491	-0.0227	-0.0169
21	MBAP	0.0670	-0.0300	-0.2173	0.5579	0.5853	-0.5064
22	MBSS	0.1770	-0.0087	-0.2848	0.3536	0.3155	-0.2920
23	MEDC	0.4387	0.0840	-0.1888	0.1517	1.0177	-0.0367
24	MYOH	0.3703	0.0131	-0.3083	-0.0630	-0.0376	-0.0611
25	PGAS	0.1586	-0.0454	-0.2393	0.0645	0.2843	0.0117
26	PSSI	0.3864	0.1376	-0.0792	0.6093	0.1986	-0.1500
27	PTIS	0.1868	0.0299	-0.0510	0.0421	0.5916	-0.2458
28	RAJA	-0.1521	-0.0073	-0.1795	0.0054	0.4104	0.5925
29	RUIS	-0.4501	1.5802	0.0125	0.0181	0.0367	0.0433
30	SOCI	0.0194	0.1403	-0.1615	0.0023	0.2226	0.1681
31	TEBE	10.5193	0.2861	-0.4789	1.2632	0.7450	-0.1913
32	ANTM	0.9975	0.2945	-0.1634	0.4045	0.1947	-0.1063
33	DKFT	8.2048	0.0564	1.0840	0.2214	-0.4425	0.0441
34	TINS	0.1963	-0.2644	0.0387	0.7048	0.5456	0.0227

Lampiran 10
Hasil Statistik Deskriptif

	TAHUN	BCSIZE	ACMEET	MNJOWN	RPT	GOVOWN	POLCON	FSIZE	FGROWTH	FSF
Mean	2020.500	4.343137	10.38235	0.040563	0.156796	0.070341	0.225490	0.021563	0.700571	0.367647
Median	2020.500	4.000000	6.000000	0.001500	0.036500	0.000000	0.000000	0.008050	0.055400	0.000000
Maximum	2023.000	11.00000	77.00000	0.685100	1.000000	0.650000	1.000000	0.168100	67.42920	1.000000
Minimum	2018.000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000100	-0.867300	0.000000
Std. Dev.	1.712026	1.770002	11.94820	0.127690	0.263441	0.186132	0.418933	0.030542	4.949426	0.483351
Skewness	0.000000	0.775718	3.074505	4.021311	2.087146	2.457274	1.313743	2.039954	12.33000	0.548995
Kurtosis	1.731429	3.665851	13.15318	18.73978	6.429049	7.313206	2.725922	6.926359	164.2347	1.301395
Jarque-Bera Probability	13.67882	24.22763	1197.627	2655.607	248.0563	363.4305	59.31985	272.5265	226140.2	34.77213
	0.001071	0.000005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	412182.0	886.0000	2118.000	8.274900	31.98630	14.34960	46.00000	4.398800	142.9165	75.00000
Sum Sq. Dev.	595.0000	635.9804	28980.18	3.309885	14.08846	7.032927	35.62745	0.189363	4972.855	47.42647
Observations	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204

Sumber: Output Eviews, 2024

Lampiran 11

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification
 Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests
 Equation: UNTITLED
 Date: 11/20/24 Time: 12:47
 Grouping based upon predicted risk (randomize ties)

	Quantile of Risk		Dep=0		Dep=1		Total Obs	H-L Value
	Low	High	Actual	Expect	Actual	Expect		
1	0.0255	0.1553	18	17.6362	2	2.36385	20	0.06351
2	0.1569	0.2205	15	16.2306	5	3.76945	20	0.49502
3	0.2210	0.2488	18	16.0379	3	4.96211	21	1.01590
4	0.2489	0.2889	16	14.5470	4	5.45300	20	0.53229
5	0.2897	0.3255	12	14.5877	9	6.41226	21	1.50335
6	0.3315	0.3708	13	13.0395	7	6.96053	20	0.00034
7	0.3711	0.4185	13	12.2292	7	7.77082	20	0.12505
8	0.4185	0.5029	10	11.3444	11	9.65558	21	0.34652
9	0.5030	0.6292	7	8.84576	13	11.1542	20	0.69057
10	0.6321	1.0000	7	4.50182	14	16.4982	21	1.76458
	Total		129	129.000	75	75.0000	204	6.53713
H-L Statistic			6.5371		Prob. Chi-Sq(8)		0.5873	
Andrews Statistic			6.4996		Prob. Chi-Sq(10)		0.7717	

Sumber: Output Eviews, 2024

Lampiran 12

Hasil Uji Akurasi Model

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification

Equation: UNTITLED

Date: 11/20/24 Time: 12:55

Success cutoff: C = 0.5

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)≤C	114	47	161	129	75	204
P(Dep=1)>C	15	28	43	0	0	0
Total	129	75	204	129	75	204
Correct	114	28	142	129	0	129
% Correct	88.37	37.33	69.61	100.00	0.00	63.24
% Incorrect	11.63	62.67	30.39	0.00	100.00	36.76
Total Gain*	-11.63	37.33	6.37			
Percent Gain**	NA	37.33	17.33			

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
E(# of Dep=0)	89.06	39.94	129.00	81.57	47.43	129.00
E(# of Dep=1)	39.94	35.06	75.00	47.43	27.57	75.00
Total	129.00	75.00	204.00	129.00	75.00	204.00
Correct	89.06	35.06	124.12	81.57	27.57	109.15
% Correct	69.04	46.75	60.84	63.24	36.76	53.50
% Incorrect	30.96	53.25	39.16	36.76	63.24	46.50
Total Gain*	5.80	9.98	7.34			
Percent Gain**	15.79	15.79	15.79			

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation

Sumber: Output Eviews, 2024

Lampiran 13

Hasil Uji Akurasi Model dan Hasil Uji Kelayakan Keseluruhan

Regresi

McFadden R-squared	0.130754	Mean dependent var	0.367647
S.D. dependent var	0.483351	S.E. of regression	0.453096
Akaike info criterion	1.231626	Sum squared resid	40.03266
Schwarz criterion	1.378014	Log likelihood	-116.6259
Hannan-Quinn criter.	1.290843	Deviance	233.2517
Restr. deviance	268.3381	Restr. log likelihood	-134.1691
LR statistic	35.08640	Avg. log likelihood	-0.571695
Prob(LR statistic)	0.000026		
Obs with Dep=0	129	Total obs	204
Obs with Dep=1	75		

Sumber: Output Eviews, 2024

Lampiran 14

Hasil Uji Regresi Logistik

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.100010	0.466903	-2.355970	0.0185
BCSIZE	-0.030709	0.096312	-0.318846	0.7498
ACMEET	0.060271	0.024671	2.442934	0.0146
MNJOWN	3.341755	1.332010	2.508806	0.0121
RPT	1.317965	0.652162	2.020917	0.0433
GOVOWN	-3.836911	1.658309	-2.313749	0.0207
POLCON	-0.885980	0.444759	-1.992048	0.0464
FSIZE	-4.562516	5.913754	-0.771509	0.4404
FGROWTH	0.890106	0.332102	2.680221	0.0074
McFadden R-squared	0.130754	Mean dependent var	0.367647	
S.D. dependent var	0.483351	S.E. of regression	0.453096	
Akaike info criterion	1.231626	Sum squared resid	40.03266	
Schwarz criterion	1.378014	Log likelihood	-116.6259	
Hannan-Quinn criter.	1.290843	Deviance	233.2517	
Restr. deviance	268.3381	Restr. log likelihood	-134.1691	
LR statistic	35.08640	Avg. log likelihood	-0.571695	
Prob(LR statistic)	0.000026			
Obs with Dep=0	129	Total obs	204	
Obs with Dep=1	75			

Sumber: Output Eviews, 2024